FOCAL POINT FOR WOMEN IN POLITICAL PARTY

Studi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPW PKS Jawa Timur

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

RARA IFTITAH MAY RAIN AYU

I01219026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

2023

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim.,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RARA IFTITAH MAY RAIN AYU

Nim : I01219026

Program Studi : ILMU POLITIK

Judul Skripsi : *"FOCAL POINT FOR WOMEN IN POLITICAL PARTY:* Studi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPW PKS Jawa Timur"

Menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapat gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.
3. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensinya.

Surabaya, 20 Juni 2023

Menyatakan,

Rara Iftitah May Rain Ayu

NIM I01219026

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah memeriksa dan memberikan arahan serta koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis Oleh :

Nama : Rara Iftitah May Rain Ayu

NIM : I01219026

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul **: "FOCAL POINT FOR WOMEN IN POLITICAL PARTY Studi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPW PKS Jawa Timur"** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 15 Juni 2023

Pembimbing

Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si

NIP : 196909071994032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang disusun oleh Rara Hitah May Rain Ayu dengan judul **"FOCAL POINT FOR WOMEN IN POLITICAL PARTY: Studi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPW PKS Jawa Timur"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 6 Juli 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I	Penguji II
Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si	Laili Bariroh, M.Si.
NIP. 196909071994032001	NIP. 197711032009122002

Penguji III	Penguji IV
Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag., M.Si.	Noor Rohman, M.A.
NIP. 197411102003121004	NIP. 198510192015031001

Surabaya, 18 Juli 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,

Prof. Dr. H. Abdul Chalik, M.Ag.

NIP. 197306272000031002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rara Iftitah May Rain Ayu
NIM : 101219026
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU POLITIK
E-mail address : raraiftitahmayrainayu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
FOCAL POINT FOR WOMEN IN POLITICAL PARTY
Studi Peningkatan keterwakilan Perempuan di DPW PKS Jawa Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 September 2023

Penulis

METERAI TEMPEL
AFF84AKX509864576

(RARA IFTITAH M.R.A)
nama terang dan tanda tangan

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRACT

Rara Iftitah May Rain Ayu, 2023. FOCAL POINT FOR WOMEN IN POLITICAL PARTY: Study of Increasing Women's Representation in the East Java PKS DPW. Thesis for Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: Gender Mainstreaming Strategy, East Java PKS DPW, Political Parties, Women's Representation, Gender

The theme of this research was carried out by the authors starting from the low participation of women from the East Java PKS DPW in the East Java DPRD. This research aims to answer, How is the PKS agenda in increasing the representation and strengthening of women in political parties? The purpose of this study is to explore gender mainstreaming carried out by PKS in increasing women's representation in strengthening political parties. using the contextual chosen by the first author the strategy of gender mainstreaming, and gender mainstreaming in political parties. In order to answer the problem formulation above, the approach chosen is to use a qualitative research approach with a descriptive research type. Data collection techniques were carried out through interviews and documentation from several literatures that are in accordance with this study. The theory used is the Gender Mainstreaming Theory by Sylvia Walby and the recruitment mechanism by Joni Lovenduski.

The results obtained through this research are that the East Java PKS DPW has a field that contains specifically for women, namely the Women's Field and Family Resilience. This field is the PKS agenda to increase women's representation, even so this field lacks branding down to the grassroots which causes the programs initiated by this field to become less well known, and the platform for women to develop only up to this field alone, this is appropriate with research conducted by Ani Soetjipto. PKS has met the threshold of 30% in its membership, but in every field there are still some that have not met the representation of women. PKS has its own gender responsive program namely Capacity Building for Women Members, this is done by PKS so that its female cadres are ready to enter the community through training provided by PKS. PKS recruits through their approach to family, colleagues, and neighbors. More than that PKS also has a member registration form that can be accessed online, according to the author this is a good initiative from PKS but the selection of members from PKS is felt by the author to be lacking. Finally, PKS also has a strategy initiated to prepare their cadres for the 2024 election, namely how to manage volunteers, training and training to gain votes and win votes, as well as digital literacy to reduce swelling campaign costs.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Rara Iftitah May Rain Ayu, 2023 FOCAL POINT FOR WOMEN IN POLITICAL PARTY: Studi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPW PKS Jawa Timur. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Strategi Pengarusutamaan Gender, DPW PKS Jawa Timur, Partai Politik, Keterwakilan Perempuan, Gender.

Tema penelitian ini diusung oleh penulis bermula dari rendahnya partisipasi perempuan dari DPW PKS Jawa Timur di DPRD Jawa Timur. Penelitian ini terfokus untuk menjawab, Bagaimana agenda PKS dalam meningkatkan keterwakilan serta penguatan perempuan di partai politik? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggali mengenai pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh PKS dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada penguatan kelembagaan partai politik. Kerangka kerja konseptual yang dipilih oleh penulis yang pertama strategi pengarusutamaan gender, dan pengarusutamaan gender di partai politik. Dalam rangka menjawab rumusan masalah diatas, pendekatan yang dipilih yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dari beberapa literatur yang sesuai dengan penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu Teori Pengarusutamaan Gender oleh Sylvia Walby dan Mekanisme rekrutmen oleh Joni Lovenduski

Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu bahwa DPW PKS Jawa Timur memiliki bidang yang memuat khusus untuk perempuan yakni Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. Bidang tersebut adalah agenda dari PKS untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, meskipun begitu bidang tersebut kurang dalam melakukan *branding* sampai ke akar rumput yang menyebabkan kurang terkenalnya program-program yang digagas oleh bidang ini, dan wadah untuk perempuan berkembang hanya sampai pada Bidang tersebut saja hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ani Soetjipto. PKS sudah memenuhi ambang batas 30% dalam keanggotaannya, tetapi pada setiap bidang masih ada beberapa yang belum memenuhi keterwakilan perempuan. PKS memiliki program responsif gender sendiri yaitu Peningkatan Kapasitas Anggota Perempuan, hal tersebut dilakukan PKS agar kader perempuannya siap dalam terjun ke masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh PKS. PKS melakukan rekrutmen melalui pendekatan mereka terhadap keluarga, rekan, dan juga tetangga. Lebih dari itu PKS juga memiliki form pendaftaran anggota yang dapat diakses online, menurut penulis hal tersebut merupakan inisiasi yang baik dari PKS tetapi penyeleksian anggota dari PKS dirasa kurang oleh penulis. Terakhir PKS juga memiliki strategi yang digagas untuk mempersiapkan kader mereka pada pemilu 2024 yaitu bagaimana mengelola relawan, diklat pendulangan dan pemenangan suara, dan juga melek digital untuk menekan biaya kampanye yang membengkak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI..... iii
MOTTO.....iv
PERSEMBAHAN v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENULISAN SKRIPSI..... vi
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
KATA PENGANTAR.....ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Definisi Konseptual.....12
1. Strategi Gender.....12
2. Keterwakilan Perempuan 13
3. PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 13
BAB II : KAJIAN TEORITIK 14
A. Penelitian Terdahulu 14
B. Kerangka Teori: Pengarusutamaan Gender.....20
1. Strategi Pengarustamaan Gender.....20
2. Pengarusutamaan Gender di Partai Politik.....31
BAB III : METODE PENELITIAN.....38
A. Pendekatan Penelitian 38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 39
C. Informan Penelitian.....39
D. Teknik Pengumpulan Data.....42
E. Teknik Analisis Data.....43
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....45
G. Sistematika Pembahasan 46
BAB IV : PENGARUSUTAMAAN GENDER PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA JAWA TIMUR DALAM
PENINGKATAN KETERWAKILANPEREMPUAN 48
A. Pengarusutamaan Gender di Partai Politik: Studi Kasus PKS 48
B. Setting Penelitian.....51
1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera 51

2. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera.....56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Komposisi Pengurus DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Timur 58
C. Data dan Analisis: Agenda PKS dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dan Penguatan Perempuan di Partai Politik 61
1. Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga 67
2. Tahapan Rekrutmen PKS 83
3. Strategi PKS dalam Mempersiapkan Kader Perempuan untuk Pemilu 2024.....100
BAB V : KESIMPULAN 112
A. Kesimpulan 112
B. Saran.....114
DAFTAR PUSTAKA.....115
LAMPIRAN
1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi
3. Jadwal Penelitian
4. Surat Keterangan (Bukti Melakukan Penelitian)
5. Biodata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keterwakilan Perempuan 2004-2019 3
Tabel 1.2 Susunan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur Majelis Pertimbangan Wilayah 6
Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Gender 50
Tabel 4.2 Indeks Pemberdayaan Gender 50
Tabel 4.3 Keterwakilan Perempuan di Parlemen 51
Tabel 4.4 Struktur Pengurus Inti DPW PKS Jawa Timur 57
Tabel 4.5 Perwakilan Perempuan 1999-2019 59
Tabel 4.6 Rekapitulasi Kegiatan RKI Jawa Timur 66
Tabel 4.7 Capaian November BPKK 2022 67
Tabel 4.8 Rencana Aksi Pemenangan 2023-2024 80
Tabel 4.9 Keanggotaan PKS 2020-2025 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Wawancara dengan Ibu Rofhani Dosen Pascasarjana
UIN Sunan Ampel Surabaya 144
Gambar 1.2 Wawancara dengan Ibu Lilik Hendarwati Bendahara DPW PKS Jawa Timur dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi C 144
Gambar 1.3 Wawancara dengan Ibu Lina Ariani Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW PKS Jawa Timur 145
Gambar 1.4 Wawancara dengan Pak Irwan Setiawan
Ketua DPW PKS Jawa Timur 145
Gambar 1.5 Wawancara kedua dengan Ibu Lina Ariani 146
Gambar 1.5 Wawancara dengan Pak Abdul Rahman Shaleh
Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Jawa Timur 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengarusutaman Gender di dalam partai politik adalah isu yang penting di Indonesia, hal ini tentu terkait minimnya representasi perempuan di partai politik dan kebijakan kuota 30% untuk caleg perempuan. Hal tersebut harus diterapkan oleh seluruh partai politik, tidak terkecuali partai politik Islam, seperti PKS. Kebijakan kuota 30% diterapkan di Indonesia, karena Indonesia adalah negara demokrasi yang mana demokrasi sendiri memiliki arti yakni kedaulatan rakyat sesuai dengan prinsip kesetaraan politik yang dijamin secara konstitusional diantara warga negara yang cukup mandiri untuk mengekspresikan keinginan mereka sendiri.[1] Selama ini juga dunia politik dianggap berparas laki-laki. Anggapan tersebut muncul dari adanya "citra" dari kehidupan politik yang tidak sepenuhnya benar, yaitu bahwa politik itu kotor, keras, dan lain sebagainya, yang merupakan ciri-ciri dari maskulin. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam politik dapat dikatakan rendah. [2] Oleh sebab itu pengarusutamaan gender hadir untuk menjawab hal tersebut.

Dalam hal ini negara demokrasi meniscayakan adanya partai politik, karena partai politik menjadi tulang punggung bagi berjalannya demokrasi yang terdapat di Indonesia, sebab peran penting partai politik dalam aneka proses politik di lembaga legislatif, pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang semuanya tidak

---

[1] Olle Tornquist, *Politics and Development: A Critical Introduction*, (London: Sage Publications, 1999), Hal. 123.
[2] Muhammad Lusi Renhoat, Skripsi: *Peran Perempuan Dalam Partai Politik (Suatu Kajian Komunikasi Politik Pada Partai Demokrat Di Kota Tual)*, 2020, Hal. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dilepaskan dari partai politik.[3] Partai politik harus memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi serta harus memperhatikan berbagai kepentingan dan tuntutan dari kader maupun masyarakat, khususnya perempuan. Bagaimana partai politik dapat membuka diri dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam komunikasi politik, minimal sebagai rekan kader perempuan, dan menyuarakan kepentingan perempuan.[4]

Pentingnya komunikasi politik yang mengajak perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atau ikut pemerintahan dan memasuki arena politik bukan hanya sekedar meningkatkan partisipasi perempuan. Lebih penting lagi, keterwakilan perempuan dalam pembuatan kebijakan diharapkan dapat mengungkapkan aspirasi dan kepentingan perempuan sendiri, bukan hanya sekedar kuota terpenuhi, tetapi sebenarnya menjalankan fungsinya dengan benar[5], agar partai dapat bersaing dalam pemilu untuk memenangkan kontestasi dengan *branding* mereka masing-masing. Negara demokrasi juga menentukan pemimpin negara mereka dengan menggunakan pemilihan umum. Salah satunya ialah terdapat Pemilu Legislatif.

Pada Pemilu Legislatif 2019 Partai Keadilan Sejahtera meraih 4 kursi, dan kursi tersebut mayoritas terpilih adalah laki-laki yang menempati DPRD Jawa Timur, lalu pada 2024 PKS Jatim menargetkan merebut 14 kursi di DPRD provinsi setempat pada hasil Pemilu 2024.[6] Keterwakilan perempuan pada anggota legislatif tingkat Provinsi

---

[3] Efriza, Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik, *Jurnal Politica*, Vol. 10 No. 1, 2019, Hal. 18.
[4] Muhammad Lusi Renhoat, Hal. 5.
[5] Muhammad Lusi Renhoat, Hal. 5.
[6] Lukman Hakim,*"PKS targetkan raih 14 kursi DPRD Jatim pada Pileg 2024",* diakses dari https://bit.ly/3jGb5Wk, pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 00.09.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa Timur mengalami stagnan, yakni keterwakilan perempuan pada pemilu 4 tahun terakhir tidak menunjukkan bukti bahwa perempuan sudah memenuhi kuota representatif 30%. Hal tersebut ditunjukkan melalui tabel berikut:

Tabel 1.1

Keterwakilan Perempuan 2004-2019

Tahun	Keterwakilan Perempuan
2004	16%[7]
2009	17%[8]
2014	15%[9]
2019	18,4%[10]

Dari pemilu 2004-2019 dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan sama sekali belum mencapai kuota representatif yaitu 30%.

Padahal seperti yang kita ketahui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 yang membahas mengenai Pengarusutamaan Gender yakni mendorong agar menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan juga perempuan dalam proses pembangunan Indonesia.[11] Adanya singgungan mengenai Pengarusutamaan Gender pada paragraf di

[7] Andi Suwarko, Hal. 246.
[8] Andi Suwarko, Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Rekruitmen Pengurus dan Caleg di DPW PAN Jawa Timur Pada Pemilu 2014, *Jurnal Review Politik*, Vol. 4 No. 2, 2014, Hal. 246.
[9] Ani Purwanti, Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 Di Provinsi Jawa Timur, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2015, Hal. 195.
[10] DPRD Provinsi Jawa Timur, *"Keterwakilan Perempuan di DPRD Jatim Periode 2019-2024 Hanya 18,4 Persen"*, diakses dari https://bit.ly/3M4zdhA , pada tanggal 13 Oktober 2022, pukul 02.00.
[11] Kemenppa, *Kertas Kebijakan 1: Pengarusutamaan Gender*, diakses dari https://bit.ly/3Iv5OhW , pada 9 Januari 2023.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas sebagai pedoman, Adapun yang dimaksud pengarusutamaan gender (PUG) adalah strategi pencapaian keadilan dan kesetaraan gender (KKG) yang dikemas melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan masalah wanita. Setelah itu dilakukan implementasi, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan. Pengarusutamaan gender atau PUG singkatnya adalah strategi yang secara logis dan sistematis mencapai kesetaraan dan keadilan gender di banyak aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara).[12] Tetapi pada realitanya peran perempuan dalam ranah-ranah tertentu masih terbatas, misalkan saja dalam politik. Perempuan masih belum memenuhi kuota representatif 30%.

Menanggapi hal tersebut kurang terpenuhinya keterwakilan dari perempuan ini karena adanya hambatan yang membuat perempuan tersebut tidak dapat memenuhi kuota representative 30%. Hambatan tersebut dapat berupa hambatan situasional yang berupa hambatan yang dihasilkan akibat adanya *stereotype* antara laki-laki dan juga perempuan, hambatan dari dalam partai politiknya sendiri seperti persyaratan untuk mencalonkan diri adalah pengalaman dalam memimpin dan juga melihat calon perempuan dari sisi pendidikan serta pekerjaan, hambatan finansial juga menjadikan calon legislatif perempuan tidak sepenuhnya dapat memaksimalkan kampanyenya apalagi ketika posisinya mereka tidak mandiri dalam hal ekonomi, lalu hambatan yang

[12] Ni Made Wiasti, Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG), *Sunari Penjor: Journal Of Anthropology*, Vol. 1 No. 1, 2017, Hal. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya adalah ketidaksiapan model rekrutmen di partai yang belum terorganisir secara baik dan belum memberikan suatu inovasi.[13]

Sebagaimana diketahui PKS sendiri pada pemilu Jawa Timur 2004-2014 sama sekali tidak menyumbang kader perempuan mereka untuk menjadi anggota legislatif, semua yang terpilih didominasi oleh laki-laki. [14] Pada 2019 PKS Jawa Timur menyumbang 1 kader perempuan mereka atas nama Lilik Hendarwati untuk menggantikan Alm. Arif Hari Setiawan sebagai anggota DPRD Jawa Timur Dapil 1 Surabaya.[15] Menurut Lilik Hendarwati pada wawancara yang dilakukannya dengan lembaga KPU, ia mengatakan bahwa PKS bukan partai yang kaya, PKS mendapatkan uang dari kader yang patungan setiap bulan, jadi ketika mereka maju menjadi caleg biaya untuk kampanye ditanggung masing-masing. [16] Hal tersebut membuat kurangnya proses kandidasi dari perempuan di PKS belum cukup kuat, karena finansial juga termasuk hambatan pada paragraf diatas.

Sesungguhnya PKS yang terletak di Jawa Timur lebih condong kepada laki-laki dari pada perempuan. Hal tersebut dapat diketahui melalui Susunan Dewan Pemimpin Tingkat Wilayah dari PKS, perempuan yang menjadi DPW hanya 1 yaitu Lilik Hendarwati yang menjabat sebagai bendahara, sedangkan ketua, wakil,

---

[13] Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur:Kajian Tentang Seleksi Perempuan di Partai Politik, *Riset Kepemiluan Tahun 2019*, diakses dari kpujatim.go.id , Hal. 64-68.
[14] Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, Hal. 86.
[15] Sofyan Arif Candra Sakti, *"Lilik Hendarwati Gantikan Arif HS Sebagai Anggota DPRD Jatim, Berkas Sudah Sampai Gubernur Khofifah"*, diakses dari https://bit.ly/3jD8oof , pada tanggal 14 Oktober 2022, pukul 4.45.
[16] Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, Hal. 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekretaris dari Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariah Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah didominasi oleh laki-laki seperti tabel di bawah ini. [17]

Tabel 1.2

Susunan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW)

Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur

Majelis Pertimbangan Wilayah

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Ir. H. Yusuf Rohana
2.	Sekretaris	Ahmad Habibul Muiz, Lc, M. Sos.
3.	Ketua Dewan Syariah Wilayah	Dr. KH. Muhammad Ajir Abdi Moenip, Lc., MA.
4.	Sekretaris Dewan Syariah Wilayah	H. Abdul Karim Saifulloh, S.E.
5.	Ketua Dewan Pengurus Wilayah	Irwan Setiawan, S.IP.
6.	Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah	Ahmadi S.Si.
7.	Bendahara Dewan Pengurus Wilayah	Hj. Lilik Hendarwati

[17] PKS, *"Susunan Pengurus",* diakses dari https://bit.ly/3JQiZqU , pada tanggal 14 Oktober 2022, pukul 6.40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.	Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah	H. Abdul Rahman Shaleh, Lc.

Sumber: Web resmi PKS Jawa Timur.

Dari tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang menempati jabatan tertinggi di DPW PKS Jatim didominasi oleh laki-laki. Banyak cara yang dilakukan oleh partai untuk ramah terhadap perempuan, salah satunya dengan memasukkan perempuan ke dalam struktur-struktur susunan partai[18], memang pada tabel diatas terlihat hanya 1 perempuan saja yang dapat menduduki posisi tertinggi di partai.

Dewasa ini adanya peran perempuan dalam dunia politik semakin terlihat meskipun belum sepenuhnya mencapai kuota yang telah ditetapkan yakni 30%, tetapi partai-partai yang ada di Indonesia berusaha untuk memberikan tempat untuk perempuan dapat berkiprah dalam partai politik. Beberapa partai politik juga semakin terlihat dalam memberikan ruang kepada perempuan, tak terkecuali PKS, sehingga patriarki dalam partai terbukti berkurang, bahkan hampir tidak ada.

Pemilihan legislatif tentunya diwarnai oleh banyak partai tak terkecuali Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS hadir sebagai partai yang berbasis Islam, dimana Islam di Jawa Timur mayoritas lebih banyak dari agama-agama yang lain. PKS tentunya harus mempersiapkan anggota-anggotanya yang terjun dalam pemilihan legislaitf pada 2024 supaya lebih aktif mengkampanyekan visi misi dari PKS dan juga

[18] Joni Lovenduski, *Politik Berparas Perempuan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), Hal. 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

visi misi anggota yang terpilih menjadi calon. PKS harus bersaing dengan partai-partai yang lain secara sehat, karena Jawa Timur lebih banyak didominasi oleh PDIP.

Banyak sekali pertimbangan yang dipikirkan oleh PKS tatkala menyerap aspirasi-aspirasi rakyat mengenai keluh kesah mereka, PKS sendiri lebih mengedepankan rakyat kalangan bawah dalam melakukan serap aspirasinya. Dalam strategi-strateginya PKS tidak kalah dengan partai-partai yang lainnya, PKS juga melakukan *mapping* agar anggota-anggotanya yang dicalonkan pada pemilihan legislatif dapat bersaing dengan kandidat-kandidat dari partai lainnya. PKS pun diharapkan dapat menggunakan metode komunikasi yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat, hal tersebut merupakan strategi komunikasi agar pesan tersampaikan, selain PKS melakukan serap aspirasi pada saat kampanye.[19] Strategi-strategi yang direncanakan oleh PKS demi mendapatkan suara pada saat kampanye sangat merakyat.[20] PKS menyerap aspirasi-aspirasi rakyat mengenai apa yang mereka keluhkan, setelah itu PKS mencoba merealisasikan hal tersebut apabila calon mereka terpilih pada saat Pemilihan Legislatif di Jawa Timur.[21] Selain itu PKS dan Calon Legislatif juga menyusun strategi tersendiri sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu juga bentuk-bentuk pendekatan yang dilakukan dengan masyarakat juga berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dari masyarakat.

---

[19] PKS, *"Aspirasi"*, diakses dari https://bit.ly/3ro4DHG , pada tanggal 14 Oktober 2022, pukul 11.00.
[20] Nyanyak Marawan Putri, Skripsi: *Branding Politik Calon Presiden Terhadap Meningkatnya suara PKS di DPRK Kota Banda Aceh Pada Pemilu 2019*, 2020. Hal. 38.
[21] PKS, *"Visi dan Misi"*, diakses dari https://bit.ly/3rqZ9vW , pada tanggal 14 Oktober 2022, pukul 17.10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan kali ini lebih menarik karena penulis ingin menggali informasi sesuai dengan judul penulis melalui Dewan Pengurus Wilayah PKS di Jawa Timur. Dengan adanya PKS di luar pemerintahan maka pemikiran kritis terhadap beberapa kebijakan yang janggal tetap dilakukan.[22] Hal tersebut didukung dengan penempatan posisi PKS yang selalu di luar lingkaran pemerintah atau oposisi dan menjadi sesuatu yang positif. [23] Karena sudah banyak partai yang tergabung dalam koalisi di pemerintahan, ketika pemerintah mengambil keputusan yang merugikan rakyat mereka justru diam dan tidak memberikan kritik apapun kepada pemerintah, terlebih ketika masing-masing partai yang berada di lingkaran pemerintahan mendapat beberapa posisi strategis untuk para anggotanya.[24]

Penelitian ini ingin melihat sejauh mana pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh PKS dalam kelembagaan di partai mereka, serta adanya rekrutmen yang juga dilihat oleh penulis untuk menakar sejauh mana penagrusutamaan gender dari kelembagaan PKS. Untuk mendapatkan kader-kader yang berkualitas tentunya hal tersebut harus dimulai dengan rekrutmen yang transparan dan berkualitas juga, karena gerbang dari kemajuan parati politik itu sendiri berawal dari bagaimana mereka melakukan rekrutmen untuk menambah anggota mereka, kemudian bagaimana mereka dapat melakukan seleksi yang baik untuk dapat menghasilkan kader terbaik mereka melalui kaderisasi juga tentunya.

---

[22] Ade Prasetio, Skripsi: *Model Oposisi Partai Politik Di Indonesia: Studi Respons Gerindra dan PKS terhadap Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Tahun 2014-2017*, 2018, Hal. 12.
[23] PKS, *"Oposisi Politik"*, diakses dari https://bit.ly/37QHZk9 , pada tqnggal 14 Oktober 2022, pukul 16.40.
[24] Achmad Nasrudin Yahya, *"Syaikhu: Sikap Oposisi PKS adalah Ijtihad Politik"*, diakses dari https://bit.ly/3uRTql3 , pada tanggal 14 Oktober 2022, pukul 17.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini rekrutmen yang dilakukan oleh DPW PKS di Jawa Timur dapat diakses melalui laman resmi PKS. Hal tersebut tidak dipungut biaya dan mudah untuk diakses oleh siapapun, namun disitu permasalahannya karena mudah untuk diakses dan siapapun dapat mendaftar menjadi anggota PKS maka strategi apa yang dilakukan oleh PKS guna melakukan seleksi pada kader-kadernya, khususnya kader perempuan. Apakah pertimbangan dari PKS sehingga kader tersebut dapat bergabung dengan PKS. Untuk seleksinya sendiri dilakukan pada domisili masing-masing pendaftar, tetapi penulis lebih berfokus kepada DPW PKS yang ada di Jawa Timur.[25]

Oleh sebab itu adanya suatu rekrutmen dan juga seleksi pada saat rekrutmen yang ada di PKS ini sangat penting guna untuk menciptakan generasi-generasi berkualitas yang dapat meningkatkan keterwakilan pada perempuan. Karena bicara soal perempuan, maupun gender selalu sangat menarik untuk diulik lebih dalam. Partai-partai biasanya memproyeksikan gagasan-gagasan mereka yang membahas mengenai implikasi.[26] Tidak hanya menyoal mengenai rekrutmen dan juga gagasan mengenai gender tetapi pembentukan karakter yang dilakukan oleh PKS harus tepat sasaran agar kadernya nanti jikalau terpilih mengemban amanah masyarakat dapat terus amanah dan tidak melakukan penyimpangan. Pertanyaannya adalah apakah PKS ini serius dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam ranah partainya. Untuk menjawab ini, tentu saja harus diketahui bagaimana strategi rekrutmen yang dilakukan oleh PKS, apakah sudah berkualitas, sehingga bisa mendapatkan calon-

[25] PKS, *"Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera"*, diakses dari https://bit.ly/3gTdCym , pada 29 Oktober 2022, pukul 19.10.
[26] Joni Lovenduski, Hal. 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon yang berkualitas ini disebabkan seleksi yang dilakukan oleh pihak PKS pada saat rekrutmen adalah seleksi yang baik dan transparan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah yakni Bagaimana Strategi Pengarusutamaan Gender PKS dalam Meningkatkan Keterwakilan Politik Perempuan di Kelembagaan Partai Politik?

Dalam rangka menjawab rumusan masalah diatas ada beberapa hal yang bisa dielaborasi, yaitu:

1. Bagaimana tahapan-tahapan rekrutmen PKS dalam mewujudkan pengarusutamaan gender?
2. Bagaimana keberpihakan PKS pada masalah perempuan?
3. Bagaimana program-program responsif gender yang dilakukan oleh PKS?
4. Bagaimana Strategi PKS dalam mempersiapkan kader perempuan untuk pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini apabila penelitian ini berhasil untuk menggali secara dalam mengenai strategi pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh PKS dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada penguatan kelembagaan partai politik beserta menjawab beberapa pertanyaan turunan yang telah disebutkan pada rumusan masalah. Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk atau titik terang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi organisasi perempuan di luar partai maupun perempuan dalam partai untuk menelisik mengenai strategi pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh PKS.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat manfaat yang dihasilkan dari adanya penelitian ini. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis penelitian ini adalah untuk menguji teori yang ada dalam strategi pengarusutamaan gender partai politik pada penguatan kelembagaan partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di PKS
2. Manfaat Praktis penelitian ini adalah dapat menjadi acuan untuk partai lain yang memiliki masalah serupa dalam strategi pengarusutamaan gender partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.

E. Definisi Konseptual

Pada penelitian yang dilakukan ini perlu adanya paparan mengenai istilah-istilah yang diteliti sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya salah tafsir daalm mengartikan istilah

1. Strategi Pengarusutamaan Gender

   Dalam hal ini yang dimaksud dengan Strategi Gender yaitu cara-cara dasar atau rencana-rencana yang dilakukan guna untuk melakukan integrasi terhadap gender sehingga dapat tercapainya suatu keadilan dan juga kesetaraan gender.[27]

[27] Dina Hermina, Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan, *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. II No. 1, 2014, Hal. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi adanya strategi gender ini diharapkan agar dapat meniadakan perbedaan yang didasarkan oleh gender, yang mana biasanya perbedaan itu menjadi suatu hambatan bagi kesetaraan gender. Adanya strategi gender ini dilakukan untuk memantau dan juga mengevaluasi apakah terjadi ketidaksetaraan di dalamnya.

2. Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan Perempuan memiliki arti yakni suatu tindakan untuk merepresentasikan adanya *figure* perempuan dalam berbagai hal, contoh saja seperti dalam pemilihan umum. Dalam hal ini tentunya diharapkan bahwa perempuan dapat merepresentasikan dirinya dalam ranah politik, seperti ikut mengambil suatu keputusan dalam perumusan kebijakan agar dapat pula tercapainya suatu aspirasi masyarakat khususnya perempuan[28], apabila ada *figure* perempuan yang dapat mewakili dalam ranah politik.

3. PKS (Partai Keadilan Sejahtera)

Partai politik ialah sebuah organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya pada kekuasaan sehingga pendukung mereka (politisi) bisa mendapatkan keuntungan dari dukungan mereka. [29] Partai Keadilan Sejahtera berdiri pada 20 Juli tahun 1998. Sebelumnya Bernama Partai Keadilan saja tetapi karena pada tahun 1999 tidak dapat memenuhi ambang batas parlemen yakni 2%

[28] Andi Aulia Nabila., dkk, Reformasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Melalui Gayatri Curriculum Program Guna Meningkatkan Daya Saing Perempuan dalam Ranah Politik, *Jurnal Legislatif*, Vol. 2 No. 2, 2019, Hal. 103.
[29] Rika Ramadhanti, Partai Politik dan Demokrasi, *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Vol. 16 No. 3, 2018, Hal. 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka digantilah menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2003. [30] Partai Keadilan Sejahtera, saat ini dominan dengan warna *orange* yang mana warna tersebut memiliki arti yakni kehangatan dan semangat muda, warna *orange* juga memberikan suatu makna yaitu ketulusan dan juga kemurnian hati.[31] PKS juga meyakini prinsip demokrasi dapat ditemukan dalam konteks Islam dan juga Indonesia. Bagi PKS, demokrasi membuka peluang bagi partai Islam untuk mencapai tujuan politik.[32]

[30] Erfina Nurussa'adah dan Suwandi Sumartias, Hal. 44.
[31] Vera Wijayanti Sutjipto., dkk, Citra Partai Keadilan Sejahtera Mengenai Perubahan Lambang Partai bagi Generasi Muda, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 15 No. 2, 2021, Hal. 158.
[32] Khoiruddin Muchtar dan Aliyudin, Public Relations Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilukada Jawa Barat, *Communicatos: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3 No. 1, 2019, Hal. 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menulis penelitian ini penulis juga melakukan pra-riset yaitu dengan mengumpulkan penelitian terdahulu yang membahas mengenai judul terakit, penulis mengacu pada piramida terbalik yang mana semakin kebawah maka akan dikerucutkan kepada perbedaan dan juga persamaan dari beberapa paparan penelitian-penelitian sebelumnya yang dituliskan di akhir setelah 10 penulisan penelitian terdahulu. Peneliti akan menjelaskan hal ini dengan memaparkan rumusan masalah, metode penelitian, hasil penelitian.

Pada topik penelitian ini telah dilakukan juga beberapa penelitian dengan topik serupa yakni terkait keterwakilan perempuan, yang pertama Penelitian dari Ani Ani Martini dalam, *"Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024"*, Pada penelitian tersebut ditemukan rumusan masalah yaitu Bagaimana mendeskripsikan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024? bahwa pada pemilu di periode 2019-2024 kuota perempuan yang menempati legislatif hanya sejumlah 22,22% yang mana hal tersebut masih belum memenuhi ambang batas 30%. Dari yang penulis baca penyebabnya adalah karena calon legislatif perempuan tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi, hal tersebut dapat menghambat pergerakan dari caleg perempuan untuk maju dan berkembang. Lalu Ani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Martini juga menggunakan teori keterwakilan elektoral untuk menganalisis pemilu pada 2019-2024, serta ia menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif yang digunakan oleh Ani untuk mendeskripsikan temuan-temuannya.[33]

Setelah adanya pembuka mengenai penelitian yang dilakukan oleh Ani Ani Martini pada paragraf diatas yang membahas mengenai keterwakilan perempuan pada ranah anggota legislatif, kini giliran penelitian dari Rofhani Rofhani dan Ahmad Nur Fuad yang membahas mengenai keterwakilan kandidat perempuan di PKS, subjek yang sama dengan penelitian penulis, Rofhani Rofhani dan Ahmad Nur Fuad menggali judul mengenai, *"Moderating anti-feminism: Islamism and women candidates in the Prosperous Justice Party (PKS)"*, yang mana penulis tersebut menemukan bahwa peran publik merka di politik menjadi peran sekunder dikarenakan mereka memiliki peran primer dalam rumah tangga/sebagai istri. Penulis juga menemukan bahwa berbeda dengan pemilu 2009 dan 2014, pemilu 2019 PKS lebih mempersiapkan secara matang kandidatnya yang diusung untuk mencalonkan diri pada ranah legislatif, penulis juga memberikan gambaran bahwa partai mempersiapkan calon perempuan dengan memberikan mereka pelatihan khusus tentang isu-isu yang harus mereka angkat selama kampanye, dan strategi untuk

[33] Ani Ani Martini, Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, Vol. 4 No. 1, 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenangkan suara dan pemasaran politik. Penulis mendapatkan informasi-informasi tersebut melalui wawancara salah satunya denga Arif Hari Setiawan.[34]

Kemudian selain adanya keterwakilan juga terdapat suatu partisipasi yang tertuang dalam penelitian Amareta Kristina dalam, *"Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen",* adapula rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian tersebut yaitu Bagaimana Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen? Penelitian tersebut mengatakan bahwa minimnya keterwakilan dari perempuan disebabkan karena masih lekatnya budaya patriarki di Indonesia, lalu Amareta juga memaparkan statistik dari badan pusat statistik tentang angka keterwakilan perempuan di DPR yang mana pada 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 97 perwakilan perempuan menduduki parlemen, lalu pada 2019 sebanyak 120 perwakilan perempuan yang mana sebenarnya hal tersebut artinya perempuan mengalami suatu peningkatan. Penelitian tersebut juga menggunakan teori partisipasi politik dan teori keterwakilan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif lalu pengumpulan informasi atau data menggunakan desk study atau biasa dikenal dengan studi literatur.[35]

---

[34] Rofhani Rofhani dan Ahmad Nur Fuad, Moderating AntiFeminism: Islamism and Women Candidates in the Prosperous Justice Party (PKS), *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol 40 No. 1, 2021.

[35] Amareta Kristina, Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol. 9 No. 1, 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masih berlanjut menanggapi kategori keterwakilan yang mana pada penulis menemukan penelitian dari Sumarzan Mulia dalam, *"Keterwakilan Perempuan dalam Politik (Analisis Peningkatan Jumlah Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019 Dapil 3 Aceh Selatan"*, Dalam penelitian tersebut terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimana keterwakilan perempuan dalam politik terhadap peningkatan jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu 2019 dapil 3 Aceh Selatan? Lalu ditemukan bahwa biasanya keterwakilan perempuan mengalami penurunan atau bahkan *stuck* di persentase tertentu tetapi pada penelitian membuktikan bahwa adanya tingkat kenaikan keterwakilan perempuan di Dapil 3 Aceh Selatan dibuktikan dengan terpilihnya 2 perempuan untuk menduduki kursi parlemen dari 5 kursi artinya Pemilu pada Dapil 3 Aceh Selatan dinyatakab berhasil dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Teori yang digunakan oleh Sumarzan untuk menganalisis penelitian tersebut yakni teori gender dan juga teori partai politik dengan menggunakan metode kualitatif sebagai bentuk untuk mendeskripsikan temuan-temuan yang diperoleh oleh Sumarzan.[36]

Ada pula masih dalam kategori yang sama yakni membahas mengenai keterwakilan tetapi dalam bagian ini selain ada keterwakilan juga membahas mengenai upaya peningkatan yang dibahas dalam penelitian Rizki Priandi dalam, *"Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia"*, Terdapat rumusan masalah yang ada di penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana

[36] Sumarzan, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Analisis Peningkatan Jumlah Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019 Dapil 3 Aceh Selatan), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6 No. 2, 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partisipasi politik perempuan dalampemilihan umum di Indonesia?, 2. Bagaimana upaya peningkatan partisipasi politik perempuan dalampemilihan umum di Indonesia? Menurut penulis bahwa keterwakilan perempuan di Indonesia ini masih sangat minim sama seperti penelitian Amareta yang mengatakan keminiman keikutsertaan perempuan di Indonesia dan juga hal tersebut masih belum memenuhi ambang 30% yang mana artinya tingkat ketertarikan perempuan pada dunia politik ini dinilai masih kurang. Poin bagus yang diberikan oleh peneliti ini yakni ia memberikan solusi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yakni yang pertama adanya pemberian informasi tentang hal-hal yang berbau politik dimulai dari lingkungan keluarga, yang kedua anak perempuan yang masih bersekolah haruslah mengikuti organisasi intra maupun ekstra untuk meningkatkan kesadaran mereka agar menjadi pemimpin, ketiga yakni pemberian motivasi agar perempuan dapat memiliki kesadaran lebih untuk berpartisipasi dalam dunia politik, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas adalah menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan sumber data dari literatur.[37]

Beralih pada penelitian internasional yang membahas topik yang sama yakni keterwakilan dari Marco Radojevic dalam *"The Subjective Effects of Gender Quotas: Party Elites Do Not Consider "Quota Women" to Be Less Competent"*, Ditemukan rumusan masalah yaitu Bagaimana kuota mempengaruhi persepsi elit partai terhadap penerima kuota? Menurut Marco keterwakilan perempuan memang belum terlalu

[37] Rizki Priandi dan Kholis Rosiah, Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak dan lebih dari 100 negara banyak memberikan kuota untuk perempuan agar mereka dapat memenuhi kuota tersebut, penulis juga memilih responden yang berasal dari kelompok partai yang ada di Austria, Jerman, dan juga Swiss. Disini Marco menjelaskan bahwa secara umum penelitian ini ingin berfokus pada bagaimana kuota mempengaruhi komposisi dari legislatif dan bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi kebijakan atau kompetensi politis. Marco menggunakan penelitian empiris dan pendekatan eksperimental, dengan teori yang digunakan yaitu representasi politik.[38]

Pada penelitan ini penulis mempertanyakan apakah suatu keterwakilan perempuan ini hanya harapan atau realitanya memang keterwakilan perempuan dapat membantu, penelitian tersebut dari Jannatul Ferdous dalam *"Representation Of Women In Parliament Of Bangladesh: Is It Hopeful?"*, Penulis mengawali gagasan dengan mengatakan bahwa di Negara bagian seperti Bangladesh yang masih berstandar dengan agama, budaya, dan politik yang mana laki-laki masih mendominasi, sulit untuk perempuan di Bangladesh dapat mengembangkan dirinya. Metode yang dipakai penulis untuk menganalisis penelitian tersebut yakni dengan review buku, laporan penelitian, jurnal, mengikuti seminar, dan juga internet. Penulis juga menemukan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan di Bangladesh hanya melalui iklan, film, dan parahnya adalah melalui pornografi. Tetapi pada saat

[38] Marco Radojevic, The Subjective Effects of Gender Quotas: Party Elites Do Not Consider "Quota Women" to Be Less Competent, Politics and Gender, *Published online by Cambridge University Press*, 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini perempuan di Bangladesh telah melakukan beberapa persiapan untuk memajukan pemikiran perempuan di Bangladesh. Pada pemilihan pertama tahun 1973 perempuan hanya sekitar 15 orang saja yang menduduki parlemen, tetapi saat ini jumlahnya sampai 70 kursi.[39]

Setelah diatas membahas mengenai Bangladesh, beralih ke Jepang, dengan kategori yang sama mengenai keterwakilan yakni terdapat penelitian Rieko Kage, Frances M. Rosenbluth, dan Seiki Tanaka dalam *"What Explains Low Female Political Representation? Evidence from Survey Experiments in Japan"*, Penulis mencoba menganalisis mengapa keterwakilan perempuan kurang dari sisi pemilih maupun calon yang ada di Jepang. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan bahwa perempuan di Jepang lebih memilih untuk tidak terlibat dalam bidang politik dikarenakan kesibukan mereka mengurus anak (apabila sudah menikah dan memiliki anak) dan juga perempuan di Jepang lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan pergi bekerja dari pada terlibat dalam urusan politik.[40]

Pada bagian ini ditemukan juga penelitian yang membahas mengenai keterwakilan yaitu penelitian oleh Lambertha Gundalibra Sari dan Mohammad Rozikin dalam, *"Analisis Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Politik Berwawasan Gender: Studi Dokumentasi Tentang Gender di Indonesia"*, Penulis

[39] Jannatul Ferdous, Representation Of Women In Parliament Of Bangladesh: Is It Hopeful?, *Journal of Governance And Public Policy*, Vol. 6 No. 2, 2019.
[40] Rieko Kage, Frances M. Rosenbluth, dan Seiki Tanaka, What Explains Low Female Political Representation? Evidence from Survey Experiments in Japan, *Politics and Gender*, Vol. 15, Issue 2, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan metode kualitatif dengan studi dokumentasi dalamu melakukan penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis menemukan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perempuan agar dapat meningkatkan keterwakilannya pada politik yakni dengan mengembangkan pemikirannya serta gagasannya dan juga meningkatkan kualitas perempuan. Penulis juga meyakini apabila hal tersebut terpenuhi maka tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan dapat meningkatkan persentase keterwakilannya pada bidang politik di Indonesia.[41]

Setelah adanya pembahasan panjang mengenai penelitian sebelum-sebelumnya yang membahas mengenai keterwakilan perempuan, pada paragraf ini akan beralih topik yaitu akan membahas mengenai beberapa penelitian sebelumnya juga yang sudah melakukan *research* dan membahas mengenai strategi, Pada penelitian yang pertama ini terdapat penelitian Pascal Lupien dalam *"Participatory Democracy, Democratic Education, and Women"*, Penulis berfokus pada sejauh mana strategi keterampilan perempuan dapat meruntuhkan atau memperkuat peran gender itu sendiri, Pascal menemukan bahwa perempuan memiliki keterampilan secara teknis adapula faktor organisasi (peneliti menemukan bahwa perempuan di tiga negara ini sudah percaya diri dan memiliki *public speaking* yang bagus sebagai bekal mereka untuk bisa berbicara di depan umum), dan juga keterampilan pada bidang politik (mencakup pemahaman bagaimana mencari dukungan politik untuk masalah atau

[41] Lambertha Gundalibra Sari dan Mohammad Rozikin, Analisis Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Politik Berwawasan Gender: Studi Dokumentasi Tentang Gender di Indonesia, *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 4 No. 5, 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inisiatif lokal, prosedur untuk mengajukan keluhan mengenai isu-isu seperti pemberian layanan publik atau korupsi, memahami bagaimana prosedur dan lembaga bekerja di berbagai tingkat pemerintahan, dan pengetahuan tentang undang-undang. dan hak warga negara). Pascal melakukan penelitian tersebut dari beberapa wawancara semi-tersetruktur di 3 negara yakni Venezuela, Ekuador, dan Chili.[42]

Dalam hal ini untuk menyusun suatu penelitian terdahulu yang baik adalah dengan menggunakan piramida terbalik. Pada awal paragraf penulis sudah banyak membahas mengenai keterwakilan, kemudian dikerucutkan menjadi strategi. Pada penelitian Sarah F Anzia dan Rachel Bernhard dalam, *"Gender Stereotyping and the Electoral Success of Women Candidates: New Evidence from Local Elections in the United States"*, Peneliti menggunakan metode kuantitatif, studi literatur dan juga analisis empiris. Penulis menemukan bahwa, rata-rata kandidat perempuan memiliki strateginya tersendiri agar mereka lebih unggul dibandingkan laki-laki dalam pemilihan legislatif tetapi keuntungan itu berkurang dan menjadi kerugian bagi perempuan yang mencalonkan diri sebagai eksekutif. [43]

Setelah beberapa pemaparan mengenai penelitian yang dilakukan sebelumnya tersebut ditemukan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai keterwakilan perempuan dan juga strategi.

---

[42] Pascal Lupien, Participatory Democracy, Democratic Education, and Women, *Journal Of Latin American Studies*, Published online by Cambridge University Press, 2022.
[43] Sarah F Anzia dan Rachel Bernhard, Gender Stereotyping and the Electoral Success of Women Candidates: New Evidence from Local Elections in the United States, *British Journal Of Political Science*, 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaannya adalah yang *pertama* penelitian diatas menggunakan studi kasus berbeda dengan penulis, yang *kedua* beberapa paparan penelitian diatas mengatakan bahwa banyak *upgrade* yang dilakukan oleh perempuan agar dapat bersaing dengan laki-laki meskipun banyak hambatan dan beberapa penelitian menyatakan keberhasilan perempuan dalam bersaing. Oleh sebab itu penelitian ini masih baru dan dapat dijamin keasliannya.

B. Kerangka Teori: Pengarusutamaan Gender

1. Strategi Pengarusutamaan Gender

Isu mengenai gender sendiri sudah tidak asing dalam kehidupan bermasyarakat, sebenarnya gender sendiri terbentuk karena konstruksi sosial atau berdasarkan persepsi masyarakat mengenai perbedaan perempuan dan juga laki-laki.[44] Ketika hal tersebut terbentuk dalam lingkup masyarakat maka biasanya akan menjadi habitat yang sulit sekali untuk dirubah pemikirannya. Sedangkan gender dan politik adalah 2 hal yang saling berkaitan, misalnya dalam pengambilan keputusan dibutuhkan tidak hanya laki-laki yang mengambil keputusan melainkan perempuan juga harus andil dalam hal tersebut guna untuk mencapai suatu kesetaraan gender. Oleh sebab itu apabila dalam politik hanya ada laki-laki saja maka hal tersebut tidaklah adil, jadi diperlukan peran perempuan pula dalam bidang politik. Dalam gender dan politik terdapat adanya

[44] Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak, Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik, *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12 No. 3, 2017, Hal. 410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strategi untuk pengarusuramaan gender agar dapat meningkatkan suatu keterwakilan perempuan supaya kuota 30% dari perempuan dapat terpenuhi dengan semestinya.

Secara umum strategi diartikan sebagai tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan perencanaannya. [45] Strategi sendiri biasanya dilakukan oleh orang atau kelompok untuk merencanakan sesuatu agar dapat berjalan sesuai rencana, strategi sendiri biasanya digunakan untuk mempermudah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Buzzel dan Gale, strategi ialah suatu kunci dari kebijakan dan keputusan yang digunakan untuk memanajemen, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi perencanaan yang dilakukan.[46] Menurut Griffin, strategi juga diartikan sebagai rencana menyeluruh yang ada pada organisasi untuk tujuan tertentu. [47] Dalam penelitian ini juga terdapat strategi pemenangan yang mana strategi pemenangan dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana partai politik dapat mengatur rencana mereka untuk dapat mendulang suara pada saat pemilu mendatang, hal tersebut disebut dengan strategi politik. Strategi yang efektif memungkinkan untuk memanfaatkan peluang dan membatasi ancaman di lingkungan eksternal yang ada.

Strategi politik dalam sebuah pemilu memainkan peran yang sangat penting karena merupakan bagian dari aktivitas persuasi. Pada dasarnya itu semua adalah

[45] Irwan Budiana, dkk, *Strategi Pembelajaran*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), Cetakan I, Hal. 38.
[46] Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), Hal. 19.
[47] Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hal. 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangkaian dari aktivitas terencana, strategis tetapi juga taktis. Tujuannya membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi, dan perilaku pemilih. Menurut Peter Schorder strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan.[48]

Gender dalam kamus Inggris-Indonesia diartikan sebagai alat kelamin. [49] Gender sendiri ialah istilah yang mengacu pada laki-laki dan perempuan. Struktur ini tidak lagi membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang dimiliki. Gender adalah seperangkat peran yang memberi tahu orang lain apakah kita laki-laki atau perempuan, seperti kostum dan topeng di teater.[50] Secara umum konsep gender adalah perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. *The Encyclopedia of Women's Studies* menjelaskan bahwa gender bukanlah perbedaan biologis maupun sakral. [51] Gender juga mengacu pada perbedaan kepribadian laki-laki dan perempuan berdasarkan struktur sosial budaya yang berkaitan dengan sifat, status, dan peran dalam masyarakat. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah

---

[48] Kuncoro Puspito, Strategi Pemenangan Caleg Dalam Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus: Kemenangan Danie Budi Tjahyono di Dapil Provinsi I Jawa Tengah), *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 10 No. 3, 2021, Hal. 6.
[49] John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia: AnEnglish-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Gramedia, 2019), Hal. 204.
[50] Irham Abdul Haris, Pembelajaran Responsif Gender dalam Pendidikan Islam, *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, Vol. 7 No. 1, 2021, Hal. 24.
[51] Irham Abdul Haris, Hal. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah “maskulinitas” dan “feminitas”, konsep budaya maskulin dan feminin.[52] Strategi dari gender sendiri artinya yakni melakukan suatu perencaan dengan tujuan kesetaraan gender dalam bidang-bidang tertentu agar gender tidak lagi dimaknai sebagai pembatas, misalnya dalam bidang pekerjaan baik pekerjaan diluar maupun pekerjaan di dalam rumah.

Beberapa hal memang harus diupayakan untuk alasan yang lebih baik, seperti pengupayaan kesetaraan gender yang sifatnya memang harus diusahakan agar terjadi kesetaraan gender, ada 2 kategori upaya untuk menciptakan kesetaraan gender, sebagai berikut:[53]

Segi Internal, memang apabila seseorang menginginkan sebuah perubahan maka hal tersebut haruslah dimulai dari dirinya terlebih dahulu. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti itu juga perempuan harus memiliki keinginan dan juga kemauan dalam diri mereka untuk berkembang, pun untuk maju dengan meningkatkan kualitas diri mereka. Contohnya saja seperti menyelesaikan pendidikan tinggi.

Segi Eksternal, tak jarang lingkungan yang baik akan menghasilkan bibit yang unggul pula seperti itulah segi eksternal ini dimaknai. Segi eksternal dimaksudkan dari peran masyarakat, organisasi, LSM, dan lain sebagainya untuk sama-sama mengupayakan lingkungan yang ramah gender sehingga tercipta

[52] Machyudin Agung Harahap, dan Susri Adeni, Bahasa Dalam Komunikasi Gender, *Jurnal Profesional FIS Unived*, Vol. 8 No. 2, 2021, Hal. 11.
[53] Prihatin Effendi, dan Devi Ratnasari, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2018, Hal. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kesetaraan gender. Contohnya pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Pengarusutamaan Gender sebagai bentuk segi eksternal untuk mengupayakan kesetaraan gender.

Gender mengacu pada kebutuhan dan situasi laki-laki dan perempuan. Aspek ini tidak ditelaah karena sudah jelas bahwa gender berarti pembahasan tentang perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender menjadi isu penting, terutama bagi para peneliti yang menempati posisi strategis dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan. [54] Lovenduski mengatakan bahwa gender ialah sekelompok arti sosial yang dikaitkan dengan suatu pengkategorian mengenai sifat laki-laki dan sifat perempuan.[55] Stetson mengatakan bahwa ada suatu perdebatan yang semakin meluas mengenai gender yang mana hal tersebut mempertimbangkan sebuah masalah dengan membedakan antara laki-laki dan juga perempuan.[56]

Perempuan memiliki peran yang cukup dilema di Indonesia, yang mana perempuan sendiri dituntut untuk bisa bekerja dalam segala bidang termasuk partisipasi dalam politik, disisi lain perempuan yang memiliki keluarga harus mengurus keluarganya juga apalagi perempuan yang sudah menikah dan memiliki

[54] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender Sebuah Pengantar*, (Jakarta: LIPI Press, 2016), Hal. 4.
[55] Joni Lovenduski, Hal. 46.
[56] Joni Lovenduski, Hal. 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak. [57] Lovenduski memberikan penjelasannya mengenai 3 rintangan yang dihadapi perempuan dalam konteks berkiprah di dunia politik:[58]

a. Perempuan memiliki kesulitan dalam sumber daya dari pada laki-laki, oleh sebab itu peran perempuan dalam politik mayoritas tidak bisa mendapatkan jabatan-jabatan yang mendukung.
b. Adanya banyak sekali kekangan seperti keluarga dan juga kewajiban-kewajiban lainnya mengakibatkan perempuan memiliki lebih sedikit waktu untuk berkecimpung di dunia politik, berbeda dengan laki-laki yang memiliki waktu lebih luang dari perempuan untuk bisa lebih lama berkegiatan dalam dunia politik.
c. Politik dianggap sebagai tempatnya laki-laki dikarenakan politik dikategorikan sebagai tugasnya laki-laki yang menghalangi kaum perempuan untuk mengejar karir mereka dalam dunia politik.

Keterwakilan mempunyai arti yaitu adanya keikutsertaan serta keterlibatan dalam persoalan apapun yang mana keikutsertaan ini bisa dikategorikan sebagai hal-hal yang mewakili suatu kelompok atau individu. Partisipasi perempuan dalam

[57] Benni Erick, dan Masyitah, Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyyah, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 3 No. 2, 2020, Hal. 200.
[58] Joni Lovenduski, Hal. 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik hingga saat ini adalah dalam rangka memajukan dan memperjuangkan politik yang lebih ramah perempuan dalam sistem politik demokrasi saat ini. Banyak unit bahkan komite dibentuk untuk mempromosikan kesetaraan perempuan, tetapi pada saat reformasi perempuan mereka masih berjuang.[59]

Sejak Reformasi, perempuan telah memperjuangkan hak politiknya untuk mengisi kesenjangan dalam masyarakat Indonesia. Ketika perempuan masuk politik, mereka hanya bisa menegaskan hak politiknya dengan memberikan suara dalam pemilihan umum. Keterwakilan perempuan dalam pemerintahan sangat penting, baik di eksekutif maupun legislatif. Perempuan dapat memfasilitasi akses terhadap isu-isu perempuan dengan memantau dan mengklarifikasi kebijakan yang masih tidak adil terhadap hak-hak perempuan.[60]

Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan dimana perempuan berpartisipasi dalam komunitas politik perempuan. Status perempuan penting dalam dunia politik. Keterwakilan perempuan di parlemen tentunya membutuhkan peran perempuan dalam posisi strategis dalam pengambilan keputusan yang berpihak pada perempuan.[61] Keterwakilan perempuan juga harus dimulai dengan hadirnya pengurus perempuan yang kompeten sebagai pemimpin partai. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur bahwa

[59] Siti Zaetun dan Chusnul Mariyah, Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019, *The Journalish: Social and Government*, Vol. 1 No. 3, 2020, 120.
[60] Isyrofah Amaliyah, Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik, *Jurist-Diction*, Vol. 1 No. 1, 2018, 166.
[61] Rizki Priandi dan Kholis Rosiah, Hal. 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuota perempuan harus lebih aktif terlibat dalam kegiatan politik melalui kepengurusan partai politik.[62]

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) dengan tetap memperhatikan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sebagai syarat administrasi yang wajib dipenuhi sebagai calon peserta pemilu. Karena pada undang-undang sebelumnya keterwakilan perempuan belum dapat memenuhi kuota 30 persen, sehingga keterwakilan perempuan lebih ditekankan kembali dengan adanya aturan mengenai keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk memenuhi persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu. [63] Hal ini memunculkan anggapan bahwa laki-laki masih sangat mendominasi posisi kepemimpinan, sehingga diperlukan keseimbangan karena pencapaian kesetaraan gender dalam konteks demokrasi dianggap tepat di ranah politik yang ada di Indonesia. Keseimbangan dalam kesetaraan gender di Indonesia termaktub dan dikemas melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 yang membahas mengenai Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan Gender telah menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi nasional

[62] Rizki Priandi dan Kholis Rosiah, Hal. 166
[63] Rizki Priandi dan Kholis Rosiah, Hal. 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 pada Buku II Bab I.[64]

Secara garis besar pengarusutamaan gender dimaksudkan sebagai bentuk dari hubungan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan dalam bermitra, pengarusutamaan gender juga artinya komitmen untuk memastikan bahwa kebijakan dipandang sebagai tanggung jawab organisasi untuk melaksanakan kebijakan yang mempengaruhi laki-laki dan perempuan secara setara.[65] Sylvia Walby berpendapat bahwa kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender, meskipun berkaitan erat, adalah dua hal yang berbeda. Keberadaan PUG tidak secara langsung menciptakan kesetaraan gender. Walby menegaskan, tidak mudah menepis program pengarusutamaan gender sebagai produk akhir kesetaraan gender yang tidak efektif. Padahal, ini menjadi bahan untuk menilai keberadaan program-program PUG yang dikembangkan di lembaga atau organisasi. Pengarusutamaan gender dengan demikian merupakan upaya untuk melabuhkan konsep gender dalam institusi.[66]

Walby juga berpendapat bahwa pengarusutamaan gender sebagai teori difungsikan untuk merevisi konsep-konsep yang membahas mengenai gender, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk memahami dunia yang bersifat ramah

---

[64] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *"Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Kementerian/Lembaga"*, diakses dari, https://bit.ly/3q9KVBD , pada 13 Januari, pukul 1.50.
[65] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hal. 46.
[66] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hal. 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gender. [67] Walby juga merumuskan 6 konsep dalam analisis teori pengarusutamaan gender:[68]

a. Bagaimana meredakan ketegangan antara kesetaraan gender dan juga hal yang sudah umum di masyarakat seperti perbedaan antara laki-laki dan perempuan lalu mereposisikan hal yang sudah umum tersebut menjadi suatu kesetaraan gender.
b. Apakah visi dari kesetaraan gender yang ditimbulkan oleh proses pengarusutamaan gender mengacu pada gagasan "kesamaan", "perbedaan", atau "transformasi".
c. Apakah visi kesetaraan gender dapat dibedakan dari strategi untuk mencapainya, atau apakah keduanya merupakan dua dimensi dari proses yang sama.
d. Apakah hubungan mengenai pengarusutamaan gender dengan ketidaksetaraan bersifat kompleks? terutama yang terkait dengan etnis dan kelas, disabilitas, keyakinan, orientasi seksual, dan usia.

[67] Sylvia Walby, Gender Mainstreaming: Productive Tensions In Theory and Practice, *Social Politics: International Studies in Gender, State, and Society*, Vol. 12 No. 3, 2005, Hal. 321.
[68] Sylvia Walby, Hal. 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Bagaimana hubungan antara “expertise” dan “democratitation”, serta pemikiran ulang konsep dengan praktik demokrasi untuk memasukkan relasi gender.

f. Apakah implikasi sifat transnasional berpengaruh terhadap perkembangan pengarusutamaan gender.

Dari pemaparan 6 konsep tersebut, penulis menggunakan konsep Walby yang membahas mengenai *democratitation* dan *expertise.* Ada pula beberapa konsep akan digunakan juga sesuai dengan kebutuhan analisis penulis. *Expertise* menunjukkan bahwa memprakarsai perumusan dan penerapan strategi kepemimpinan gender membutuhkan berbagai aktor yang memahami konsep gender. Pakar gender ini dipandang sebagai agen yang netral terhadap kebutuhan organisasi. Mereka adalah akademisi dan pakar kesetaraan yang berdedikasi untuk mengarusutamakan kesetaraan. *Democratitation* berkaitan dengan pengenalan kesetaraan dalam konteks yang lebih luas sebagai ahli dimana perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pembahasan tentang keberadaan kebijakan kesetaraan gender dan anggaran kesetaraan gender merupakan salah satu bentuk demokratisasi yang spesifik gender.[69]

Democratitation dan juga *expertise* sendiri biasanya bersifat kontras antar keduanya, yang mana *democatitation* seringkali terkontaminasi oleh mayoritas, seperti dalam parlemen. Ketika membahas mengenai kesetaraan, Walby juga

[69] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Hal. 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendiskripsikan ada beberapa pendekatan yang muncul, yaitu kesamaan, perbedaan, dan transformasi. Mengangkat isu kesetaraan gender dapat bermula dari posisi bahwa laki-laki dan juga perempuan seharusnya memiliki akses yang sama, atau kebijakan mengenai gender yang berargumentasi bahwa gender itu penting karena perempuan dan laki-laki diciptakan dengan berbeda, namun tidak boleh saling mendiskriminasi. Lalu transformasi sendiri memaknai bahwa kebijakan gender ingin mengubah kebijakan yang ada agar dapat menampung kebutuhan dari gender itu sendiri.[70]

2. Pengarusutamaan Gender di Partai Politik

Menurut Ani Soetjipto Keadaan Partai di Indonesia sekarang ditandai dengan suatu situasi yang memilukan, dimana secara internal tidak diurus secara demokratis. Salah satu alat dari sistem demokrasi adalah partai politik, yang memiliki hubungan kuat dengan suprastruktur politik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam pelaksanaan demokrasi, masyarakat paling tahu apa yang mereka butuhkan dari kandidat yang mereka dukung. [71] Partai politik dewasa ini memiliki peran penuh terhadap pemberdayaan perempuan, sehingga hal tersebut memberikan adanya peluang yang lebih terhadap perempuan. Peluang tersebut terbentuk dari kegiatan partai politik yang berbasis perempuan sehingga perempuan memiliki wadah tersendiri untuk meningkatkan kualitas

[70] Renata Dayang Naguratta Damanik, Tinjauan Pengarsutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pelatihan, *Jurnal AgriWidya*, Vol. 2 No. 1, 2021, Hal. 89.
[71] Muh. Hidayat, Pola Rekrutmen Politik Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Political Science IPDN*, 2022, Hal. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya. Selain adanya kegiatan yang berbasis perempuan, partai politik juga memfasilitasi perempuan dengan pemahaman tentang politik dan upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri agar dapat membentuk kualitas diri yang lebih dari sebelumnya, terutama dalam penyampaian ide dan gagasan.[72]

Setiap partai memiliki cara atau sistem yang berbeda dalam merekrut anggota. Dalam hal ini seperti yang disebutkan pada latar belakang bahwa partai politik menempatkan keterwakilannya dalam pesta demokrasi yang mana hal tersebut artinya partai memerlukan calon yang hendak diusung [73] , proses pencarian kandidat tersebut diambil dari perekrutan yang biasanya dilakukan oleh partai untuk memilih atau menyeleksi kandidat yang terpilih, setelah itu dipoles agar mereka siap diusung ke ranah lebih tinggi.

Dalam buku *Handbook Partai Politik* oleh Katz dan Crotty mengungkapkan bahwa dalam perekrutan di partai politik dibagi menjadi 3 kategori, yang pertama siapa yang memenuhi syarat hal tersebut perlu dikaji oleh partai politik sebelum merekrut anggota baru, biasanya setiap partai politik memiliki kriteria tertentu dalam menentukan kelayakan dari bakal calon anggota tersebut. Kemudian yang kedua yakni siapa yang mencalonkan dalam artian apakah partai sudah demokratis dalam proses pencalonan karena terkadang masih banyak partai yang

[72] Yan Sudandi Sasue., dkk, Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Jabatan Politik Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Governance*, Vol. 2 No. 2, 2022, Hal. 7.
[73] I Made Asthi Hendrawan Satria Wibawa, Skripsi: *Pola Rekrutmen Kader Partai Politik (Studi Pada Partai Golongan Karya Kabupaten Bangli Provisi Bali*, 2022, Hal. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pencalonannya hanya memanfaatkan nama besar maupun kerabat dari petinggi partai sehingga proses demokratis semakin menurun terhadap pengambilan keputusan dalam proses seleksi. Lalu yang terakhir terdapat siapa yang dicalonkan dalam penjelasannya proses ini menjelaskan tentang siapa yang masuk elit legislatif lalu memiliki dampak apa terhadap sistem politik yang ada sehingga calon tentunya harus memiliki kualitas dan kapasitas sebagai pembuat kebijakan sehingga memiliki persentase yang tinggi untuk memenangkan kursi.[74]

Biasanya tata cara perekrutan bersifat tidak transparan dan lebih mementingkan "kekerabatan". [75] Apabila partai-partai tersebut masih menerapkan hal yang bersifat negatif dalam perspektif masyarakat tersebut, maka kader yang menjalani proses kaderisasi berjenjang akan mengalami penurunan kualitas karena kurangnya pengalaman di tingkat politik pragmatis. Hal tersebut membuat kader yang memang loyal, cerdas dan telah mengabdi lama di partai tersebut sulit sekali mendapatkan suatu jaminan bahwa dirinya akan mendapatkan jabatan publik jika mereka tidak memiliki cukup modal, tidak memiliki kerabat dengan petinggi partai, atau memiliki kepopuleran. Sehingga kebijakan tersebut bisa membuat kader lama meninggalkan partai, karena loyalitas juga terbentuk dari seberapa kader tersebut mendapatkan apresiasi dari

[74] Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, (Nusa Media: Bandung, 2014), Hal. 148.
[75] Ani Soetjipto, *Politik Harapan Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, (Tangerang: Gajah Hidup, 2011), Hal. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai, dengan mencalonkan kader menjadi pejabat publik, merupakan suatu apresiasi terhadap kader atas dedikasi yang selama ini diberikan kepada partai.

Perekrutan politik ialah tugas yang harus dilakukan oleh Partai Politik. Dalam berbagai cara, partai politik harus memilih dan mengeliminasi kandidat-kandidat yang sesuai maupun belum sesuai. Menurut Joni Lovenduski dalam masing-masing partai memiliki mekanismenya sendiri, yang pertama dipilihnya suatu kandidat berdasarkan hukum pemilihan contohnya seperti keanggotaan partai maupun pengalaman dari kandidat tersebut, yang kedua cita-cita dari kandidat tersebut agar partai tersebut bersedia menerima, yang ketiga proses pengerucutan kandidat serta seleksi.[76] Selain itu menjadi kandidat yang terpilih juga dirasa tidak sedikit mengeluarkan sumber daya. Dalam hal ini tidak sampai disitu saja, setelah proses perekrutan dan kandidat dinyatakan terpilih untuk bergabung ke dalam partai, bagaimana partai tersebut dapat mengagendakan kader-kadernya untuk melakukan suatu usaha untuk sampai pada tahap pendistribusian menjadi anggota parlemen? Ani dan Shelly mengatakan bahwa apabila suatu partai dalam proses rekrutmen sampai terpilihnya kandidat tidak bersungguh-sungguh membentuk kader mereka maka dikhawatirkan ketika membawa kandidat perempuan mereka hanya mengejar kuota saja dan mengesampingkan kualitas dari kandidat mereka. [77] Setelah dilakukan

[76] Joni Lovenduski, Hal. 121.
[77] Ani Soetjipto dan Shelly Adelina, *Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati*, (Jakarta Pusat: Parentesis Publisher, 2012), Hal. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekrutan, pembinaan atau proses kaderisasi dilakukan oleh partai-partai tersebut guna membentuk kader sesuai dengan visi partai.

Kaderisasi sendiri memiliki 3 prinsip menurut Syamsudin yakni yang pertama terbuka, artinya bahwa kaderisasi ini bersifat transparan dan seluruh anggota dapat mengikuti kaderisasi tersebut dengan kesempatan yang sama antar satu anggota dan anggota lainnya. Kedua yakni prinsip non-diskriminatif, yakni adanya pemberian akses yang sama untuk anggota dapat mengikuti serta mendapatkan promosi serta karier politik melalui proses kaderisasi tanpa membeadakan suku, ras, warna kulit, serta agama. Prinsip ketiga yaitu berjenjang, berjenjang dimaksudkan agar anggota dapat diberikan materi sesuai dengan keaktifan serta kedisiplinannya, jadi perjenjangan ini memudahkan kaderisasi agar tepat sasaran. Setelah adanya kaderisasi barulah kader siap untuk didistribusikan ke ranah yang lebih serius seperti dalam pemilu.

Ketika kader diberikan amanah untuk mengikuti pemilu dengan bekal-bekal yang telah diperoleh mereka pada saat mengikuti proses kaderisasi, kader akan menggunakan bekal tersebut dengan dibersamai strategi pemenangan untuk memenangkan mereka pada saat kontestasi, tentunya hal tersebut dapat dimaksimalkan apabila aktor politik menggunakan strategi pemasaran politik agar dapat tepat sasaran.

Menurut Ani Soetjipto Pergerakan dari perempuan telah mengalami perubahan signifikan, dan ikut andil dalam demokrasi. Banyak hal sudah dilakukan demi menaikkan tingkat keterwakilan perempuan, mulai dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penambahan jumlah wakil perempuan, kiprah mereka dalam dunia politik, tetapi mengapa perempuan masih saja belum memenuhi ambang batas 30% dan perempuan banyak yang belum menempati posisi strategis menjadi ketua partai politik selain Megawati dan Grace Natalie[78], mengapa demikian? Permasalahan perempuan tidak henti-hentinya menjadi momok yang mengerikan seperti tingginya angka kematian ibu, buruh migran Indonesia yang didominasi oleh perempuan yang membuat Indonesia mendapat penilaian buruk. UNDP (United Nations Development Programme) yakni program yang dibuat oleh PBB dengan tujuan untk mengakhiri garis kemiskinan, membangun pemerintahan yang demokratis, supremasi hukum, dan institusi inklusif. Menurut UNDP dari Human Development Reports, Indonesia berada diurutan 114 dengan *Gender Development Index* Indonesia yaitu 0,941, *Human Development Index Female* 0,681 *and Male* 0,723 , *Mean Years Of Schooling Female* 8,2 *and Male* 8,9.[79]

Dalam hal ini yang mempersiapkan serta menentukan strategi untuk memperbaiki keterwakilan perempuan yakni partai politik itu sendiri.[80] Mereka mempersiapkan kemampuan perempuan yang ada di partai untuk dapat mengambil slot atau posisi aman agar partai mereka dapat terpilih pada saat pemilu. Apabila perempuan tersebut terpilih, perempuan sangat bisa untuk menggunakan serta memperluas jangkauan politik mereka. Dengan masuknya

[78] Ani Soetjipto, Hal. 19
[79] UNDP, *"Hunan Development Reports"*, Diakses dari http://bit.ly/3DxoBpn , pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 03.36.
[80] Joni Lovenduski, Hal. 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan ke ranah formal dan juga informal maka banyak harapan yang berada di pundak mereka agar dapat mencapai suatu kesetaraan gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang mana penelitian kualitatif sendiri ialah penelitian yang melihat objek secara langsung dan terjun ke lapangan untuk mengamati dan menggali informasi mengenai objek tersebut. [81] Menurut Saptari dan Holzner dalam buku Partai Politik dan Gender Separuh Hati mengatakan bahwa kualitatif lebih digemari karena dipergunakan sebagai suatu mata pisau untuk menganalisa realita yang terjadi di lapangan. [82] Penelitian ini bersifat alami dan tidak dapat dilakukan di laboratorium dikarenakan kita harus mengamati langsung mengenai objek yang akan diteliti sehingga hasilnya dapat kita deskripsikan secara langsung.

Penelitian ini mengumpulkan data secara wawancara di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Timur, melalui wawancara tersebut diketahui strategi pengarusutamaan gender, pola rekrutmen, agenda politik, serta strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam mempersiapkan kader perempuan yang diberikan amanah untuk maju pada pemilu 2024. Wawancara dilakukan kepada Anggota PKS tidak hanya dari perspektif anggota perempuan, tetapi juga laki-laki. Wawancara juga dilakukan kepada akademisi, guna untuk memberikan pandangan lain yang lebih

[81] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), Hal.
[82] Ani Soetjipto dan Shelly Adelina, Hal. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

netral mengenai riset yang dilakukan, serta beberapa aktivis ataupun pengamat gender apabila diperlukan dalam riset ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari-April 2023 yang bertempat di DPW PKS Jawa Timur yang terletak di Rungkut. DPW PKS Jawa Timur menjadi lokasi penelitian dikarenakan DPW PKS menjadi fokus utama penelitian. Ada pula lokasi lain yang disepakati bersama antara narasumber dan juga pewawancara atau sesuai permintaan dari subjek penelitian.

C. Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, karena peneliti langsung memilih siapa-siapa saja informan yang akan diwawancarai. Informan yang ditunjuk oleh peneliti yaitu Lilik Hendarwati sebagai perempuan yang dapat menduduki posisi tertinggi pada jabatan yang ada di DPW PKS Jawa Timur, serta satu-satunya perempuan yang terpilih untuk diberikan amanah di DPRD Provinsi Jawa Timur, lalu Irwan Setiawan selaku Ketua DPW PKS Jawa Timur, Lina Ariani sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Abdul Rahman Shaleh selaku Ketua Bidang Kaderisasi, dan juga Nani Rofhani selaku Kaprodi Program Doktor (S3) Studi Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya. Berikut profil dari informan penelitian:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Irwan Setiawan (Ketua DPW PKS Jawa Timur)

Irwan Setiawan mulai mengabdi menjadi wakil rakyat sejak tahun 2009. Pria kelahiran Banten, 12 Januari 1976, saat itu langsung diamanahi menjadi Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur untuk daerah Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Situbondo, Banyuwangi dan Bondowoso. Saat ini Irwan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Jawa Timur. Kiprahnya sangat ditunggu masyarakat khususnya untuk wilayah Jatim. Blusukan ke daerah daerah sudah menjadi makanannya setiap hari. Dari blusukan itulah banyak aspirasi dari Masyarakat yang ditampung.

2. Lina Ariani (Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW PKS Jawa Timur)

Bu Lina Ariani Lahir di Kediri 17 Mei 1994. Beliau bersekolah di SMAN 2 Pare Kediri, kemudian beliau melanjutkan untuk mengambil S1 di Fakultas Farmasi Unair. Lalu beliau juga pernah menjadi apoteker di Fakultas Farmasi Unair. Beliau juga ditunjuk untuk menjadi pembimbing kaderisasi di Unit Pembinaan Anggota. Pernah menjabat menjadi Ketua BPKK DPD PKS Sidoarjo 2007-2010. Lalu menjadi Sekretaris BPKK di DPW PKS Jawa Timur pada 2015-2020, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua BPKK DPW PKS Jawa Timur 2 periode 2019-2025. Bu Lina juga tergabung di organisasi IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga profesi Bu Lina saat ini yaitu sebagai apoteker penanggung jawab di Klinik Nurani Sukodono.

3. Lilik Hendarwati (Bendahara DPW PKS Jawa Timur)

Bu Lilik Hendarwati sebelumnya menjabat sebagai Ketua BPKK DPW PKS Jawa Timur, kemudian beliau saat ini menjabat sebagai bendahara di DPW PKS Jawa Timur. Beliau juga diamanahi oleh DPP PKS untuk menggantika Alm. Arif Hari Setiawan sebagai anggota DPRD Jawa Timur, Bu Lilik berada di Komisi C yang menggeluti tentang keuangan dan perbankan, perpajakan dan retribusi, pemegang kas daerah/perusahaan daerah, perusahaan patungan, badan usaha dan penanaman modal, dan pengawasan keuangan dan pembangunan daerah.

4. Abdul Rahman Shaleh (Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Jawa Timur)

Pak Abdul Rahman lahir di Jember, 09 Oktober 1972. Beliau berdomisili di Sampang, Madura dan beliau di DPW PKS Jawa Timur sebagai BPH dengan posisi Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Jawa Timur melalui Pemilihan Umum Raya masa bakti 2020-2025 yang diadakan pada Ahad, 20 Desember 2020.

5. Rofhani (Akademisi/Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya)

Bu Rofhani menjabat sebagai Kaprodi Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. Bu Rofhani adalah alumni S1 Aqidah dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, beliau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanjutkan pendidikan selanjutnya yakni S2 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan S3 Studi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dengan narasumber terkait yang ada di DPW PKS Jawa Timur dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber untuk memenuhi pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan peneliti. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan rekaman dan ditulis atau ditranskrip kata demi kata. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terbuka. Instrumen dalam wawancara yaitu mengacu pada pedoman wawancara (interview guide), bolpoin, alat perekam (recorder), kamera, dan buku catatan lapangan bila diperlukan. Untuk wawancara dengan Bu Lilik Hendarwati, Pak Irwan Setiawan, dan juga Pak Abdul Rahman dilaksanakan di DPW PKS Jawa Timur, lalu apabila terdapat kekurangan informasi dapat dilanjutkan via whatsapp. Wawancara dengan Bu Lina Ariani dilaksanakan di kediaman rumah beliau dan dilaksanakan selama 2x. Wawancara dengan Bu Rofhani dilaksanakan di Gedung Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menambah sumber referensi dari berbagai buku maupun e-book, e-journal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga website resmi[83] seperti website PKS, website BPS, website DPRD Jawa Timur maupun website-website resmi dan juga *trusted* lainnya. Berbagai data pastinya banyak sekali ditemukan dalam website tersebut, tetapi penulis berusaha melakukan filterisasi selama pencarian sumber tambahan tersebut yang disesuaikan dengan kategori atau tema yang sama dengan penelitian ini agar hasil yang didapatkan masih sama dan tidak melenceng ke topik yang lain.

E. Teknik Analisis Data

Menganalisis data adalah melakukan pengelompokan, pengurutan dan memadatkan serta menyimpulkan data dengan cara yang membuatnya agar lebih mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini, data yang didapat akan diolah dengan analisis kualitatif dengan memecahkan masalah menggunakan teori yang terdapat pada penelitian ini.[84] Analisa ini dilakukan dengan *preparation* data yang telah diperoleh pada wawancara yang diubah menjadi teks atau transkrip, lalu data tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi.[85]

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data. Sekarang akan berfokus pada data lapangan yang terkumpul lalu memilih dan memilah data yang didapatkan di lapangan, kemudian diseleksi untuk dilihat relevansinya dengan

[83] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 63.
[84] Eka Lukita Sari, Hal. 56.
[85] Eka Lukita Sari, Hal. 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian. [86] Reduksi data digunakan guna untuk memilah-milah informasi dan juga data yang telah didapatkan dalam observasi dan juga wawancara di DPW PKS Jawa Timur dan juga reduksi juga diperlukan untuk membuang data-data yang sekiranya tidak diperlukan oleh peneliti.

b. Display Data

Display data dilakukan setelah reduksi data dengan menyajikan data secara deskripsi berupa teks uraian. Data disajikan untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau pada bagian-bagian tertentu Pada fase ini, informasi-informasi yang diperoleh disajikan pertama ke dalam bentuk teks naratif. Hasil teks naratif dirangkum berupa gambaran sederhana yang menggambarkan alur proses pengamatan.[87]

c. Conclusions

Setelah data direduksi, kemudian disajikan berupa deskipsi, lalu data disimpulkan. Lalu setiap data yang diperoleh peneliti ketika melakukan wawancara di lapangan kemudia dilakukan klasifikasi kembali guna untuk memperkuat hasil temuan, apabila dirasa cukup datanya maka penelitian dihentikan.

[86] Burhan Bungin, Hal. 229.
[87] Burhan Bungin, Hal. 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Laporan penelitian kualitatif dianggap ilmiah jika validitas, reliabilitas, serta objektivitasnya terpenuhi. Dalam hal ini ada beberapahal yang harus dilakukan untuk melakukan *checking* apakah laporan penelitian kualitatif sudah sesuai:[88]

a. Uji Kredibilitas

Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya suatu kesamaan antara apa yang dilaporkan dan apa yang ditemukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti *recorder*, video, dan lain sebagainya sesuai dengan kondisi di lapangan. Lalu peneliti juga melakukan check ulang kepada narasumber mengenai informasi yang dipaparkannya dengan bertanya kembali atau meminta informan untuk mendengarkan, membaca, ataupun melihat kembali informasi yang diberikan kepada peneliti.

b. Uji Konfirmabilitas

Bentuk ketersediaan dari peneliti untuk memaparkan datadatanya kepada publik dan memberikan kepada pihak lain hak untuk menilai. Untuk dapat mewujudkan hasil penelitian kualitatif yang bersifat dependabilitas maka perlu diwujudkan dengan adanya konfirmabilitas. Dalam hal tersebut biasanya dikerjakan dengan pembimbing.

[88] Eka Lukita Sari, Hal. 57-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Sistematika Pembahasan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi konseptual. Pada bagian ini penulis menggambarkan secara singkat mengenai inti dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai pengarusutamaan gender, lalu dilanjutkan pembahasan mengenai data pemenangan perempuan di Jawa Timur, kemudian membahas mengenai keterwakilan PKS pada parlemen, hal tersebut dipergunakan agar memudahkan pembaca mendapatkan informasi singkat dari penelitian ini.

2. BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti dan berisikan kerangka teori. Pada bab ini peneliti juga menyajikan teori apa yang akan digunakan untuk menganalisis temuan-temuan. Teori yang digunakan yakni milik Sylvia Walby mengenai 6 konsep dalam pengarusutamaan gender dan penulis menggunakan konsep *expertise* dan *democratitation.* Kemudian menggunakan gagasan milik Joni Lovenduski, Ani Soetjipto untuk tambahan analisis penulis. Lalu adanya penambahan gagasan pada Handbook Partai Politik milik Katz dan Crotty digunakan penulis untuk menganalisis kaderisasi. Hal tersebut bertujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyajikan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya guna untuk menyajikan keaslian dari penelitian ini.

3. **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang dibagi menjadi beberapa sub-bab yaitu: a) Jenis Penelitian, b) Lokasi dan Waktu Penelitian, c) Tahap-tahap Penelitian, d) Teknik Pengumpulan data, e) Teknik Analisa data, dan f) Teknik Keabsahan data.

4. **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA**

Pada bab ini disajikan berupa deskripsi umum dari subjek penelitian dan penjelasan terkait data dan data penelitian yang dikonfirmasi dengan teori yang telah dipilih sebagai analisis. Kemudian dilanjutkan dengan deskripsi khusus yang lebih memfokuskan untuk pembahasan data dan analisis dengan penggabungan teori serta gagasan pada BAB II.

5. **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga diberikan saran untuk pihak yang terkait dalam penelitian ini sehingga dapat memperbaiki dan terbaharukan penelitian-penelitian dengan topik yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENGARUSUTAMAAN GENDER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA JAWA TIMUR DALAM PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

A. Pengarusutamaan Gender di Partai Politik: Studi Kasus PKS

Dewasa ini, pengarusutamaan gender memberikan ruang untuk perempuan agar dapat setara dengan laki-laki untuk mewujudkan suatu kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender sendiri didefinisikan sebagai suatu skema agar dalam bidang apapun perempuan dan juga laki-laki dapat bermitra dan tidak dibeda-bedakan, agar dapat terwujud suatu kesetaraan gender hal tersebut dipaparkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. [89] Menurut penulis adanya kesetaraan gender sendiri dapat menjadikan Indonesia menjadi Negara yang maju, mengapa demikian? Karena apabila sistem patriarki di Indonesia dihapuskan, maka laki-laki dan juga perempuan dapat menjadi rekan kerja setara dalam bidang apapun. Jadi, jabatan-jabatan tinggi di parlemen maupun perusahaan tidaklah harus laki-laki karena perempuan jua dapat mengemban tugas tersebut.

Dalam hal ini isu gender bukanlah hal baru dalam salah satu isu pembangunan karena isu tersebut kategorinya sudah sangat penting, Pada 2011 *United Nations General Assembly* mencatat mengenai partisipasi politik perempuan, *UNGA*

[89] Ita Musarrofa, Pemikiran Pierre Bourdieu Tentang Dominasi Maskulin dan Sumbangannya Bagi Agenda Pengarusutamaan Gender di Indonesia, *Kafa'ah Journal*, Vol. 9 No. 1, 2019, Hal. 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaparkan bahwa dalam bidang apapun termasuk di dalamnya ranah politik, perempuan masih terpinggirkan, *UNGA* juga menyebutkan hal tersebut dikarenakan akibat dari adanya diskriminasi terhadap gender dan parahnya adalah adanya efek kemiskinan yang lebih berdampak untuk kehidupan perempuan ke depannya. [90] Meskipun banyak dari perjuangan pergerakan perempuan telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan memperkuat kapasitas kelembagaan untuk integrasi gender, namun data menunjukkan masih terdapat adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki.[91]

Restu Novi Widiani selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3K) mengadakan pertemuan Penguatan Indeks Pembangunan Gender, dalam pertemuan tersebut Restu mengatakan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni urusan pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak, merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah. Parameter yang harus dicapai pada kinerja dalam urusan tersebut yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Restu juga mengatakan bahwa capaian dari kinerja IPG

[90] UN Women, *"Women's leadership and political participation"*, diakses dari https://bit.ly/3HWQDNf , pada 10 Mei 2023, pukul 13.40.
[91] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *"Kesetaraan Gender: Perlu Strategi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat"*, diakses dari https://bit.ly/3HF9Q66 , pada tanggal 05 Mei 2023, pukul 01.37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa Timur menglami kenaikan meskipun belum bisa dikatakan sepenuhnya optimal, tetapi IDG Jawa Timur mengalami penurunan.[92]

Tabel 4.1

Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender	
2020	**2021**
91,06	91,36

Sumber: Website Dinas Kominfo Jawa Timur

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Pembangunan Gender di Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 0,30 dari tahun 2020 ke tahun 2021. Meskipun kenaikan IPG Jawa Timur tidak sebesar itu namun hal ini dapat diapresiasi kenaikannya.

Tabel 4.2

Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender	
2020	**2021**
73,03	72,36

Sumber: Website Dinas Kominfo Jawa Timur

[92] Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, *"DP3K Jatim Gelar Pertemuan Penguatan Indeks Pembangunan Gender"*, dilansir dari https://bit.ly/3LB2otL , pada 05Mei 2023, pukul 02.21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda dengan tabel IPG, IDG mengalami penurunan sebesar 0,67. Hal tersebut harus menjadi evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengapa IDG Jawa Timur dapat mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021, padahal dari data di Badan Pusat Statistik IDG didapatkan dari adanya partisipasi aktif dari perempuan dalam bidang ekonomi dan politik.[93] Tetapi dari data yang didapatkan penulis dari Badan Pusat Statistik, Keterwakilan Perempuan di Jawa Timur pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan yang cukup bagus.

Tabel 4.3

Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Keterwakilan Perempuan di Parlemen 2021-2022	
2021	**2022**
17.50	19.17

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Tentunya dari adanya hasil tersebut peran dari keterwakilan perempuan sudah naik 1.67 yang mana meskipun sudah mengalami kenaikan tetap harus lebih gencar untuk diusung dalam banyak tema politik, tidak hanya diusung saja tetapi kendaraan dalam meningkatkan keterwakilan tersebut seperti partai politik harus mengakomodir kadernya, khususnya perempuan untuk dapat bersaing dalam dunia politik agar tidak terjadi ketimpangan antara laki-laki dan juga perempuan, supaya kesetaraan gender

[93] Badan Pusat Statistik, *"Metodologi Gender"*, dilansir dari https://bit.ly/3qlFava , pada 05 Mei 2023, pukul 03.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diwujudkan di seluruh strata sosial. Apabila partai memiliki kader yang berkualitas, maka tingkat kepercayaan dari masyarakat untuk memilih partai tersebut pada saat pemilu akan sangat berpengaruh.

Partai sebagai kendaraan politik dituntut untuk lebih memperhatikan kader-kadernya khususnya kader perempuan, agar partai tersebut mendapatkan "cap" sebagai partai yang ramah gender, maka beberapa posisi strategis harus diisi oleh perempuan. Tentunya tidak asal perempuan atau "yang penting perempuan" mengisi jabatan strategis tersebut, haruslah dilakukan cek secara berkala apakah perempuan dalam partai tersebut memiliki kualitas yang dibutuhkan oleh partai tersebut untuk mengisi jabatan-jabatan strategisnya. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana PKS dapat bisa meningkatkan keterwakilan perempuan, PKS sendiri menempatkan kader perempuannya yakni Hj. Lilik Hendarwati menjadi bendahara di DPW PKS Jawa Timur sekaligus beliau mendapatkan kehormatan untuk menduduki posisi strategis di DPRD Jawa Timur tepatnya di Komisi C dan juga Hj. Lina Ariani sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga.

Pada pemilihan umum 2024 mendatang PKS mengusung Bu Lilik dan juga Bu Lina untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, yang mana menurut peneliti hal tersebut termasuk dalam hal yang cukup *brilliant* mengapa demikian? Karena Bu Lilik sendiri mendapatkan jabatan strategis di DPRD Jawa Timur sebagai anggota komisi C dan juga di PKS sebagai bendahara, lalu Bu Lina juga menempati posisi Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga yang mana tema-tema serta isu-isu yang membahas mengenai perempuan memang selalu menyita perhatian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

publik ketika pemilu. Hal tersebut termasuk sebagai salah satu hal yang dapat menjadi pendulang suara untuk PKS, karena kedua orang yang diusung memiliki peran penting dalam hal mewakili perempuan.

B. Setting Penelitian

1. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.[94]

PKS merupakan partai Islam yang pada awalnya digambarkan sebagai partai eksklusif dengan mewujudkan suatu Gerakan Tarbiyah. [95] Gerakan

[94] PKS, *"Sejarah PKS"*, dilansir https://jatim.pks.id/sejarah-pks/ , pada 9 Mei 2023, pukul 02.12.
[95] Febrian Taufiq Sholeh, Manhaj Tarbiyah dalam Pendidikan Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), *Jurnal SALAM*, Vol. 8, No. 1, 2015, Hal. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tarbiyah yang dimaksudkan ialah gerakan dengan berdasarkan konsep Tarbiyah Islamiyah, yaitu dengan menyiapkan manusia yang memiliki dedikasi dalam rangka menciptakan keseimbangan potensi, tujuan, bahasa/tutur kata serta tindakan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi manusia untuk hidup dengan benar dengan keridhaan maupun pahala dari Allah SWT. [96] Berdirinya PKS sendiri berawal dari antusiasme dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia maupun yang sedang berkuliah di luar negeri mereka berasal dari gerakan-gerakan dakwah, Perjalanan dakwah aktivis kampus dikenal sebagai gerakan tarbiyah di Indonesia, dan itu mulai berkembang dari tahun 1990-an.[97] Sebagian besar pendiri PKS adalah aktivis muda mulai dari masjid di kampus.[98]

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK

[96] Erfina Nurussa'adah dan Suwandi Sumartias, Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Keterbukaan Ideologi, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 5 No. 1, 2017, Hal. 44.
[97] Djony Edward, *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media,
[98] Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah*, (Harakatuna Publising, Bandung 2005), Hal. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Di Jawa Timur, Partai Keadilan dideklarasikan pada Ahad, 20 September 1998. Saat itu, Rofi' Munawar diberikan amanah memimpin sebagai Ketua Umum DPW PK Jawa Timur. Pada Pemilu 1999, Partai Keadilan memperoleh 1 Kursi DPR RI dari Jawa Timur dan 3 Kursi DPRD Kabupaten//Kota yakni di Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Malang. Pada Pemilu 2004, PKS Jawa Timur memperoleh 2 Kursi DPR RI dan 3 Kursi DPRD Provinsi. Pada Musyawarah WIlayah Tahun 2006, Ja'far Trikuswahyono dipercaya memimpin DPW PKS Jawa Timur hingga Tahun 2010.

Pada Pemilu 2009, PKS Jawa Timur kembali dipercaya dengan perolehan 6 Kursi DPR RI dan 7 Kursi DPRD Provinsi. Pada Musyawarah Wilayah Tahun 2010, PKS mempercayakan Hamy Wahjunianto sebagai Ketua Umum DPW PKS Jawa Timur, hingga akhir periode tahun 2015. Pada Pemilu 2014, di tengah badai fitnah yang menghantam PKS, rakyat Jawa Timur masih memberikan kepercayaan kepada PKS dengan mendudukkan 2 Kursi DPR RI dan 6 Kursi DPRD Provinsi. Pada Musyawarah WIlayah ke-4 PKS Jawa Timur, terpilih Arif Hari Setiawan untuk menahkodai DPW PKS Jawa TImur periode 2015-2020.

2. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera

Visi dan Misi diperlukan dalam suatu partai politik untuk menentukan kemana arah dan tujuan partai mereka untuk kedepannya. Visi dan Misi ini dapat dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panduan atau pedoman mereka untuk melakukan perencanaan-perencanaan yang dapat memberikan dampak baik untuk partai mereka kedepannya. Visi sendiri berasal dari kata *vision* yang dalam bahasa inggris mempunyai arti impian.[99]PKS sendiri tentunya memiliki visi yang mereka rumuskan untuk pedoman PKS kedepannya, "Menjadi Partai Dakwah Yang Kokoh Dalam Berkhidmat untuk Ummat, Bangsa, dan Negara" itu adalah visi dari PKS yang akan mereka capai kedepannya.[100]

Jika ada visi tentunya tidak lengkap apabila tidak ada misi. Misi sendiri lebih panjang dari visi karena misi sendiri adalah apa-apa saja yang harus dilakukan oleh PKS kedepannya. Jadi dapat dikatakan bahwa misi adalah penyempurnaan dari visi, karena misi biasanya berisi mengenai rencana, komitmen, maupun tugas yang harus dilakukan kedepannya[101]. PKS sendiri memiliki misi yakni:[102]

a. Meningkatkan kontribusi partai dalam penetapan kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan ummat, bangsa, dan negara; turut berperan dalam pengembangan demokratisasi di kawasan, serta pengembangan kerjasama internasional, untuk memperkokoh posisi Indonesia di tingkat internasional.

[99] Hafizin Herman, Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan, *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Hal. 100.
[100] PKS, *"Visi dan Misi"*.
[101] Hafizin Herman, Hal. 103.
[102] PKS, *"Visi dan Misi"*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Meningkatkan peran Partai sebagai pelopor: pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat serta membangun kemitraan strategis di berbagai sektor pengabdian.

c. Mengokohkan soliditas Partai agar mampu menjalankan fungsi: edukasi, advokasi, kaderisasi kepemimpinan lokal lokal dan nasional; agregasi ideologis, dan agregasi kepentingan, serta penerapan sistem manajemen partai dakwah (SMPD) untuk meningkatkan kinerja, membangun kredibilitas, dan citra positif Partai.

d. Meningkatkan pertumbuhan kader dan mengokohkan: Integritas, akseptabilitas, profesionalitas, dan kepemimpinan kader di berbagai sektor pengabdian untuk mewujudkan cita-cita Partai.

3. Komposisi Pengurus DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Timur

Tabel 4.4

Struktur Pengurus Inti DPW PKS Jawa Timur

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Ir. H. Yusuf Rohana
2.	Sekretaris	Ahmad Habibul Muiz, Lc, M. Sos.
3.	Ketua Dewan Syariah Wilayah	Dr. KH. Muhammad Ajir Abdi Moenip, Lc., MA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Sekretaris Dewan Syariah Wilayah	H. Abdul Karim Saifulloh, S.E.
5.	Ketua Dewan Pengurus Wilayah	Irwan Setiawan, S.IP.
6.	Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah	Ahmadi S.Si.
7.	Bendahara Dewan Pengurus Wilayah	Hj. Lilik Hendarwati
8.	Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah	H. Abdul Rahman Shaleh, Lc.

C. Data dan Analisis: Agenda PKS dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dan Penguatan Perempuan di Partai Politik

Pada siaran pers yang dilakukan KEMENPPA dijelaskan bahwa angka keterwakilan perempuan dalam ranah politik mengalami kenaikan[103] meskipun belum sepenuhnya partai dapat dikatakan memenuhi 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen tetapi hal tersebut sudah menjadi *good news* agar perempuan kedepannya lebih banyak lagi yang mewakili perempuan lainnya untuk mendapatkan posisi

[103] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *"Perempuan Dukung Perempuan Dalam Politik, Faktor Penting Namun Sering Terlupakan"*, dilansir dari https://bit.ly/3HL7faN , pada 5 Mei 2023, pukul 23.11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

strategis ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, seperti PKS pada 2019 menyumbang 1 kader perempuannya untuk menduduki jabatan strategis di Komisi C atas nama Hj. Lilik Hendarwati. Menurut Ignatius Mulyono[104]

Adanya penerapan *affirmative action* (sebuah reaksi yang dilakukan karena adanya ketidaktertarikan dari perempuan akan dunia politik)[105] pada pemilihan umum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan ternyata menunjukkan hasil, memang belum signifikan tetapi hal tersebut lebih baik dari pada tidak ada keterwakilan perempuan di ranah politik. Ignatius juga menambahkan adanya peningkatan keterwakilan perempuan semakin terlihat tatkala diberlakukan *zipper system* (sistem tersebut memaknai bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan)[106], hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

Perwakilan Perempuan 1999-2019

Jenis Kelamin	**1999-2004**	**2004-2009**	**2009-2014**	**2014-2019**
Perempuan	9,0%	11,8%	18%	20,5%

[104] Ignatius Mulyono, Ketua Badan Legislasi DPRRI. Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel RUU PemiluPeluang untuk Keterwakilan Perempuan, Dep. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat di Hotel Crown, Jakarta, 2 Februari 2010, dilansir dari https://bit.ly/3NR1k7Y .
[105] Aziza Aulya., dkk, Perempuan dan Politik : Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian, *Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 30 No. 2, 2022, Hal. 127.
[106] Aziza Aulya, Hal. 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laki-Laki	91,0%	88.2%	82%	79,5%
Keterangan	Tanpa affirmative action	Dengan affirmative action kuota 30% perempuan	Dengan affirmative action kuota 30% dan zipper system 1 diantara 3 bakal calon	Dengan affirmative action kuota 30% dan zipper system 1 diantara 3 bakal calon

Sumber: Jurnal Aziza Aulya dan Diskusi Panel Ignatius Mulyono

Dari paparan diatas dan juga melihat tabel dapat dikatakan apabila *trend* peningkatan keterwakilan perempuan mulai terus mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Hal tersebut menjadi kabar yang bagus tentunya karena *trend* peningkatan keterwakilan perempuan terus digaungkan oleh partai-partai. Dalam hal ini tindakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan tidak boleh dilakukan dengan politik praktis karena hal tersebut tidak hanya merusak elektabilitas partai saja, melainkan akan merusak kepercayaan masyarakat juga, dan hal tersebut dikhawatirkan akan merusak citra perempuan dalam dunia politik.

Lovenduski mengatakan pula bahwa strategi-strategi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan mengalami proses linier yang panjang, tidak dalam jangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu pendek. [107]Menurut penulis artinya penulis juga berpendapat sama dengan Lovenduski bahwa politik tidak boleh "praktis" ada fase yang harus dilewati untuk sampai pada tahap pemenangan, Bu Rofhani juga menambahkan:

> "Kalau saya melihat PKS itu ya memang ada di kasus daerah kalau politik praktis ya dan itu saya cuma menemukan 2 orang sih kalau di Malang, yang lainnya itu memang kader ya jadi bukan politik praktis. Tapi juga ada saya lihat ada aspek politik praktis tapi tetep aja nggak jadi juga, tapi kebanyakan mereka itu dari kader."[108]

Dalam hal ini Bu Rofhani menjadi *expertise* dalam Teori Pengarusutamaan Gender yang dikonsepkan oleh Sylvia Walby, *expertise* sendiri bisa diambil gagasannya melalui akademisi dan pakar kesetaraan. Untuk kasus ini penulis mengamanahkan Bu Rofhani untuk menempati *expertise* sebagai akademisi, artinya Bu Rofhani netral dan tidak memihak PKS meskipun beliau pernah meneliti PKS. Bu Rofhani juga setuju apabila politik praktis tidak sepenuhnya berhasil, dan Bu Rofhani menemukan hanya 2 politik praktis dari Kota yang tidak disebutkan oleh Bu Rofhani.

Adanya perubahan-perubahan pada tabel diatas juga dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena pada pemilu 2019 berhasil menyumbang 1 kader perempuannya di DPRD Jawa Timur. Partai Keadilan Sejahtera serius dalam memperjuangkan perempuan hal tersebut diperkuat melalui wawancara yang

[107] Joni Lovenduski, Hal. 163.
[108] Wawancara dengan Rofhani, tanggal 2 Januari 2023 di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan penulis kepada Ibu Lina selaku Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, sebagai berikut:

> "Di PKS sendiri memiliki semangat yang tinggi terkait dengan bagaimana perempuan ini bisa berdaya dan perempuan ini bisa lebih aktif dalam peran publik ya, karena kalau peran perempuan itu ada peran asasi dan juga peran publik. Kami sangat mengakomodir dan Insya Allah di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya PKS itu juga memuat khusus perhatian terhadap tidak hanya perempuan tetapi juga anak dan keluarga ya. Karena keberhasilan pertama sebuah bangsa itu ketika keluarganya kokoh. Sehingga kami menjadikan bahwa nanti akan kami jelaskan di BPKK ada namanya deputi PKAP (peningkatan kapasitas anggota perempuan). Jadi terkait dengan itu ya PKS sangat perhatian begitu terhadap bagaimana peran dari perempuan artinya perspektifnya gender tapi bersudut pandang kita itu ada yang lebih diutamakan adalah bahasanya pengarusutamaan keluarga."[109]

Lalu hal tersebut juga tercantum pada Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan Sejahtera pada Paragraf 2 Pasal 46 yang membahas mengenai Dewan

[109] Wawancara dengan Lina Ariani, tanggal 22 Februari 2023 di Kediaman Bu Lina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengurus Wilayah, *Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas:*[110]

a. *Ketua;*
b. *Sekretaris;*
c. *Bendahara;*
d. *Bidang Kaderisasi; dan*
e. *Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga.*

Lalu ada pula pada AD/ART pasal 85 yang membahas mengenai perekrutan jabatan politik yakni, *Rekrutmen jabatan politik untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dilakukan melalui suatu proses penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan:*

a. *jenjang keanggotaan;*
b. *integritas, kapabilitas, dan profesionalitas;*
c. *keterwakilan perempuan;*
d. *keterwakilan pemuda; dan*
e. *aspirasi masyarakat.*

Menanggapi temuan-temuan diatas pada teori yang digagas Walby, ia juga menambahkan 3 pendekatan yang sudah dicantumkan oleh penulis pada sub-bab

[110] Partai Keadilan Sejahtera, *"Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga"*, Cetakan Pertama, 2021, Hal. 116, diakses dari https://pks.id/file/ad-art-pks , pada 10 Mei 2023, pukul 13.59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian teori, yang mana Walby membagi menjadi 3 pendekatan yakni kesamaan, perbedaan, dan transformasi. Menurut analisis penulis temuan-temuan diatas masuk pada ranah transformasi, karena Walby mengatakan bahwa adanya kebijakan gender dapat menampung kebutuhan gender itu sendiri. Hal tersebut sesuai apabila ditelisik karena AD/ART PKS mencantumkan hal-hal yang berguna untuk mensetarakan gender, dan transformasi yakni pendekatan Walby juga sesuai dengan AD/ART PKS.

1. **Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga**

Dapat dilihat bahwa PKS memuat bidang tersendiri yang membahas mengenai Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, yang mana hal tersebut termasuk bukti kalau PKS ini serius tentang perempuan. Bu Rofhani juga mengatakan bahwa ada beberapa temuan beliau mengenai PKS dan keseriusannya dalam keterwakilan perempuan, sebagai berikut:

> "Betul kalau ada bidang permpuan namanya BPKK. Saya melihat ya bahwa moderat anti-feminism itu meskipun sebenarnya mereka nggak feminism tapi mencoba untuk menjadi feminism aja itu hasil penelitian saya. Ketika mereka melakukan kampanye ya, bagaimana Reni Astuti memakai pisau bawah untuk menarik suara laki-laki dan perempuan ya artinya itu sangat mengena bagi masyarakat tentunya, apalagi masyarakat awam. Bu Lilik juga kampanyenya waktu itu imunisasi atau apa itu ya pengobatan murah untuk lansia dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak, Bu Lilik waktu itu bekerja sama dengan dokter juga."[111]

Dapat diketahui bahwa menurut Bu Rofhani kader PKS seperti Bu Reni Astuti sangat mahir dalam mengusung strategi pemenangan, dan menurut perspektif penulis artinya PKS ini berhasil mendidik kader-kadernya dalam menarik hati masyarakat. Lalu adanya BPKK sendiri juga sudah dikonfirmasi oleh Bu Rofhani, dan itu membuktikan bahwa PKS juga dikenal lewat bidang perempuan dan ketahanan keluarga.

Lebih jelasnya dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bu Lina selaku Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, beliau menegaskan bahwa PKS ini sudah ramah gender sebagai berikut:

> "PKS dari awal itu sudah ada bidang khusus untuk perempuan, di 2/3 periode ini baru ada ditambahkan bidang khusus tentang ketahanan keluarga. Sebelumnya sudah termasuk dalam tupoksi terkait dengan perempuan anak dan keluarga, dan Insya Allah kami sedari awal itu sudah memberikan tidak hanya kontribusi kepada anggota seperti yang sudah saya sampaikan jadi untuk meningkatkan kemampuan kapasitasnya anggota secara personal dan juga bagaimana kiprahnya nanti di masyarakat, tidak hanya menjadi anggota dewan tetapi bahwa

[111] Wawancara dengan Rofhani, tanggal 2 Januari 2023 di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua anggota PKS dalam hal ini kita berbicara perempuan itu juga memberikan kontribusi positif di masyarakat. Nah BPKK ini ada namanya yang disebut dengan rumah keluarga Indonesia, jadi kegiatan itu enggak hanya waktu pemilu tapi temen-temen senantiasa berkegiatan dari waktu ke waktu."[112]

Wawancara tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan sesuai data-data yang diberikan Bu Lina, sebagai berikut:

Tabel 4.6

Rekapitulasi Kegiatan RKI Jawa Timur

NO	KEGIATAN SEPTEMBER-NOVEMBER 2022
1	RKI Peduli di DPC Ngrayun Kab Ponorogo
2	PKSM Offline Kab Ponorogo, Kab Madiun, dan Kota Madiun
3	Silaturahim Ke Dinas Sosial Prov. Jawa Timur
4	Silaturahim Ke DWP Prov. Jawa Timur
5	Gerakan Bersama RKI Peduli dan Silaturahim Tokoh/ormas/Lembaga
6	Gerakan Bersama Konsultan melayani 1000 pahlawan keluarga
7	Diklat Pemenangan Suara Perempuan

[112] Wawancara dengan Lina Ariani, tanggal 22 Februari 2023 di Kediaman Bu Lina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8	Optimalisasi Konten Medsos

Sumber: Power Point Monev BPKK DPW PKS Jawa Timur

Dapat diketahui dari hasil data yang didapatkan oleh penulis mengenai rekapitulasi kegiatan RKI Jawa Timur pada bulan September-November 2022 bahwa RKI yang diusung oleh PKS tidak hanya bergerak pada saat pemilu saja, sesuai dengan yang dikatakan oleh Bu Lina pada saat wawancara, tetapi lebih dari itu RKI berkegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitar, khususnya Jawa Timur. Ada pula data-data yang didapatkan oleh penulis mengenai capaian data Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga pada November 2022 di 38 Kota/Kab Jawa Timur sejumlah 666 Kecamatan, sebagai berikut:

Tabel 4.7

Capaian November BPKK 2022

483 BPKK DPC (72% dari total kecamatan)
764 Titik RKI
10.269 Anggota Pendukung
40 % dari target (25.500)
315 Konsultan Keluarga
53 Pengurus Forum Ayah

Sumber: Power Point Monev BPKK DPW PKS Jatim

Sesuai hasil wawancara maka penulis sepakat dengan yang dikatakan oleh Ani Soetjipto pada kerangka teori sub-bab kedua bahwa perempuan belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepenuhnya memiliki banyak peran dalam posisi yang strategis, tetapi tidak menampik kemungkinan bahwa di DPW PKS Jawa Timur tetap mengupayakan peningkatan partisipasi perempuan melalui BPKK maupun pada posisi publik. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya partisipasi perempuan di dalam lembaga legislatif DPRD Jawa Timur, bahkan beliau (Bu Lilik) yang juga sekaligus Bendahara DPW PKS Jawa Timur menjadi satu-satunya wakil PKS di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sehingga penulis memiliki pro dan kontra terhadap argumen Ani sesuai dengan penjelasan penulis di atas. Lalu Pak Irwan Setiawan selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS menanggapi mengenai kesetaraan gender di PKS:

> "Ketika Bu Lilik menjadi bendahara kan sudah strategis ada posisi strategis yang ditempati, ketua bidang humas juga perempuan. Di kaderisasi juga ada ketua deputinya perempuan, di kaderisasi itu 30% nya perempuan dari 18 pengurus kaderisasi itu 6 nya perempuan."[113]

Walby mengemukakan 3 pendekatan yang telah dicantumkan oleh penulis, pada sub bab 1 penulis sudah menggunakan pendekatan transformasi. Lalu pada wawancara diatas menurut penulis PKS menggunakan pendekatan kesamaan, yang mana artinya PKS memposisikan laki-laki dan perempuan dalam akses yang

[113] Wawancara dengan Irwan Setiawan, tanggal 2 Mei 2023 di Kantor DPW PKS Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama, karena PKS menempatkan kader perempuannya untuk menjadi Ketua Bidang, dan menjadi BPH di DPW PKS Jawa Timur.

Meskipun para pemimpin PKS mengklaim bahwa laki-laki dan perempuan di partai memiliki hak yang setara seperti pada wawancara kepada Bu Lilik berikut:

> "Kalau dibilang setara ya setara dalam konsep pekerjaan di bidang ini harus ada perempuan di PKS seperti itu. Sebenarnya bukan melihat secara gendernya tetapi secara kemampuan, kemampuan itu bukan hanya kemampuan dalam berpikir bagi perempuan itu sendiri kemampuan mereka untuk membagi waktu di keluarganya, karena di PKS ini kan sangat konsen terhadap ketahanan keluarga. Ketika kita sudah aktif dalam kegiatan politik dalam kegiatan kemasyarakatan pasti ada satu hal yang mengganjal apabila tidak bisa membagi waktu. ini sangat konsen apabila perempuan ini diamanahi untuk menjadi sesuatu itu karena dia mampu Jadi bukan mampu dalam konteks kemampuan secara pekerjaannya tapi mampu untuk Membagi waktu, sehingga keluarganya juga tidak ditinggalkan tidak sebagainya. memang di DPW PKS Jawa Timur ini saya perempuan pertama yang menjabat sebagai bendahara."[114]

[114] Wawancara dengan Lilik Hendarwati, tanggal 21 Februari 2023 di DPW PKS Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menelisik wawancara diatas, pendekatan Walby yang terakhir yakni perbedaan dirasa cocok untuk menganalisis wawancara diatas. Mengapa penulis memakai pendekatan perbedaan? Karena Bu Lilik mengutarakan bahwa PKS ini setara, dan PKS membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan seberapa baik mereka memanajemen waktu antara keluarga dan juga pekerjaan, dan PKS sadar bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, tetapi tidak adanya diskriminasi dari laki-laki kepada perempuan maupun sebaliknya. Menurut penulis hal tersebut sesuai dengan pendekatan perbedaan yang digagas oleh Walby.

Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Rofhani (Narasumber) dan data yang didapatkan oleh penulis bahwasannya perempuan di PKS ini kebutuhan primernya adalah sebagai ibu maupun istri, apabila mereka tidak bisa membagi waktunya antara keluarga dan juga pekerjaan maka PKS tidak bisa menempatkan mereka di posisi strategis sebaliknya apabila mereka pandai dalam membagi waktu maka PKS juga akan memberikan posisi strategis kepada perempuan yang ada di PKS (tidak menutup kemungkinan).

Upaya-upaya peningkatan partisipasi perempuan terus dilakukan oleh DPW PKS Jawa Timur, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang seringkali diselenggarakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. Sehingga dengan adanya bidang tersebut perempuan memiliki wadah untuk meningkatkan kualitas individunya sehingga mampu mengaktualisasikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengarusutamaan gender dengan dibungkus oleh beberapa kegiatan yang memiliki kontribusi positif terhadap masyarakat. Meskipun yang terpilih mendapatkan posisi strategis hanya Bu Lilik saja, tetapi PKS memiliki alternatif lain agar kader-kadernya yang lain dapat berkembang seperti yang dikatakan oleh Bu Lilik, sebagai berikut:

> "Kalau anggota perempuan PKS itu difokuskan kepada Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. Jadi bidang tersebut mempunyai wadah yang bernama Rumah Keluarga Indonesia, sekarang kalau di Jawa Timur itu hampir di setiap DPC di tingkat kecamatan itu ada banyak yang sudah punya RKI, yang di sana mereka melakukan kegiatan. Jadi mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan terhadap keluarga. Jadi kita punya konsultan keluarga banyak juga di Jawa Timur dari PKS jadi kalau kita terjun di masyarakat kiri kanan kita ada permasalahan kami berdiri untuk memberikan bantuan berupa konseling. Ada orang-orang tertentu yang dilatih dalam setiap DPD ini ada sekitar 5 sampai 10 rata-rata berpasangan ya jadi kayak 5 pasang 6 pasang adalah untuk menjadi konsultan keluarga. Jadi kita membuka diri dengan menjadi konsultan mereka, bukan konsultan abal-abal tetapi kita dilatih untuk menjadi konsultan keluarga. nah ini mereka akan mendapatkan solusi, ini menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari khidmat PKS, dari perempuan PKS untuk seluruh anggota masyarakat."[115]

Menurut penulis, perempuan di PKS meskipun beberapa tidak memiliki jabatan strategis tetapi PKS menempatkan kader perempuannya langsung untuk berkiprah di Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, tidak masalah apabila tidak memiliki jabatan strategis yang terpenting aktif dalam kegiatan yang dapat membantu masyarakat sebagaimana partai politik seharusnya selalu membantu masyarakat dari pada tidak aktif sama sekali dalam bidang apapun dan hanya "baik" serta mau membantu mendengarkan masyarakat ketika kampanye saja. Apalagi sasarannya yang dibantu adalah masyarakat menengah kebawah, hal tersebut sangat tidak etis ketika membantu masyarakat hanya pada saat kampanye saja, selebihnya setelah mereka memenangkan kontestasi mereka tidak pernah lagi sebaik sebelumnya.

PKS percaya apabila ingin membangun suatu bangsa, maka hal tersebut haruslah diawali dari keluarga yang kokoh, disini peran perempuan menjadi bercabang apabila sudah berkeluarga karena ia berperan tidak hanya sebagai ibu melainkan juga istri, apalagi perempuan yang berkarir maka PKS mengupayakan kader-kadernya selalu memprioritaskan keluarganya terlebih dahulu atau *family first*, tetapi PKS tidak hanya memperhatikan kadernya saja tetapi PKS juga membantu masyarakat untuk mengokohkan keluarga mereka melalui Bidang

[115] Wawancara dengan Lilik Hendarwati, tanggal 21 Februari 2023 di DPW PKS Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan dan Ketahanan Keluarga yang memiliki beberapa fokus seperti apa yang dipaparkan oleh Bu Lina yaitu PKS memiliki 4 Deputi penting yang disesuaikan dengan kebutuhan PKS dan juga masyarakat. Deputi yang pertama yakni Deputi Ketahanan Keluarga difungsikan untuk membantu masyarakat mulai dari pembekalan pra nikah sampai pembekalan mengenai parenting. Menurut penulis adanya kegiatan tersebut dapat membantu permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan keluarganya, karena permasalahan-permasalahan keluarga apabila tidak diselesaikan dengan cara yang baik maka dikhawatirkan akan berujung pada berakhirnya rumah tangga tersebut. Apabila rumah tangga sudah rusak sampai akhirnya harus berpisah, dampak paling luar biasa dialami oleh anak, anak akan menjadi dampak paling parah dari berpisahnya keluarga. Oleh sebab itu PKS hadir untuk membantu meringankan permasalahan keluarga yang dialami oleh masyarakat.

Setelah membahas deputi pertama, paragraph ini akan membahas tentang deputi kedua membahas peningkatan kapasitas anggota perempuan, deputi tersebut dikhususkan untuk kader perempuan PKS mulai dari meningkatkan kepercayaan diri sampai bagaimana kader PKS dapat berkomunikasi dengan masyarakat agar lebih siap apabila sewaktu-waktu diberikan amanah untuk menjadi calon anggota legislatif agar bisa lebih luwes dalam penyampaian pada saat kampanye. Menurut pendapat penulis meningkatkan kepercayaan diri untuk para kader memang perlu, pembinaan secara berkala juga diperlukan. Di deputi ketiga PKS memiliki deputi kelembagaan perempuan yang mana hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

difungsikan untuk bersilaturahim dengan seluruh kalangan masyarakat, antara deputi kedua dan deputi ketiga menurut penulis berkaitan, karena untuk bisa bersilaturahim dengan seluruh kalangan tidak hanya dibutuhkan keberanian namun juga kepercayaan diri dalam berkomunikasi.

Pada paragraf ini ditutup dengan adanya deputi terakhir yaitu deputi kajian perempuan, kajian perempuan dimaksudkan untuk berdiskusi serta mendorong pengesahaan perda maupun undang-undang yang pro perempuan. Walby memaparkan pengarusutamaan gender melalui sebuah konsep dengan dua penjelasan, salah satunya adalah *expertise* yang menjelaskan bahwa perumusan program kerja yang membidangi konsep gender membutuhkan aktor yang memahami konsep gender seperti akademisi dan pakar kesetaraan gender. Lalu tidak hanya itu, PKS dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan lewat BPKK, PKS juga memiliki program unggulan di BPKK selain Rumah Keluarga Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Bu Lina yaitu yang pertama ada kegiatan RKI Peduli yang mana biasanya RKI Peduli memberikan apa yang perempuan butuhkan contohnya seperti paket sayur, sembako, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada RKI Tanggap Bencana yang mana RKI terjun langsung untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana seperti yang terjadi di Lumajang. Kemudian Bu Lina juga menambahkan adanya Pendidikan Keluarga Sejahtera yang sifatnya lebih ke arah memberikan pendidikan yang berkaitan dengan keluarga kepada masyarakat. Lalu ada kegiatan pendidikan untuk anak, pendidikan untuk orang tua, dan ada pemberdayaan ekonomi juga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan RKI murni dari sumber daya kader-kadernya, jadi PKS terlebih lagi RKI berkegiatan dengan "patungan" dan juga dari orang-orang yang ingin menyumbang, dan RKI ini kegiatannya disesuaikan juga dengan masyarakat, misalnya ada remaja yang terganggu *mental health* nya maka RKI disitu mengadakan konsultan remaja yang tentu saja mereka mengadakan pelatihan untuk konsultan yang dari psikologi. Termasuk melatih konsultan untuk menangani permasalahan keluarga.

Untuk menunjang gagasan diatas, narasumber juga menambahkan kegiatan lain yang bukan berasal dari BPKK, sebagai berikut:

> "Kemudian di PKS itu ada tapi bukan di bawah bidang perempuan namanya unit pembinaan, itu yang dilakukan bisa 1 bulan sekali itu dibawahnya bidang kaderisasi jadi mereka yang mau bergabung untuk ikut pembinaan itu juga ada pendidikan pemahaman politik, karena kalau dulu itu orang memahami politik itu menakutkan, tapi kan nggak politik itu sama seperti kita berkebutuhan dengan ekonomi, jadi kita penting untuk melakukan pendidikan politik ke masyarakat. Jadi kita itu semuanya bisa berkiprah, memilih itu kan juga politik ya, kalau anda pilihannya salah ya nanti kedepannya juga salah. bahwa setiap apa yang kita kerjakan sebagai orang muslim itu kan ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawabnya, tidak hanya tanggung jawab di dunia tetapi juga di akhirat."[116]

Dari pemaparan di atas, PKS dengan program RKI sesuai dengan penjelasan yang dirumuskan oleh Walby mengenai "tidak mudah menepis program pengarusutamaan gender sebagai produk akhir kesetaraan gender yang tidak efektif" sehingga apa yang digagas oleh BPKK tidak hanya fokus dalam satu isu tentang keluarga. Tetapi meluas dengan menjadikan program tersebut lebih peduli terhadap masyarakat sekitar, seperti adanya program RKI Peduli dan RKI Tanggap Bencana. Sehingga BPKK PKS sendiri lebih aktif dalam meningkatkan partisipasi perempuan, tidak hanya dalam urusan politik, distribusi caleg, distribusi pemimpin dsb, tetapi lebih dari itu PKS menjadikan kader lebih memahami permasalahan yang ada di masyarakat. Terlebih dengan adanya unit pembinaan yang memuat mengenai peningkatan partisipasi perempuan yang terus diupayakan oleh bidang kaderisasi di PKS.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan, beliau mengatakan bahwa PKS sudah termasuk partai yang ramah terhadap gender, sebagai berikut:

"Ketika menjadi bendahara kan sudah strategis ada posisi strategis yang ditempati, ketua bidang humas juga perempuan. Di kaderisasi juga ada ketua deputinya perempuan, di

[116] Wawancara dengan Lina Ariani, tanggal 22 Februari 2023 di Kediaman Bu Lina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaderisasi itu 30% nya perempuan dari 18 pengurus kaderisasi itu 6 nya perempuan. Jadi menurut saya sudah proporsional, lalu saya yakin dengan perempuan yang lebih berdaya ke depan peluangnya untuk menempati posisi-posisi publik ya."[117]

Sylvia Walby menjelaskan *democratitation* berkaitan dengan pengenalan kesetaraan dalam konteks yang lebih luas sebagai ahli dimana perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan. Pembahasan tentang keberadaan kebijakan kesetaraan gender dan anggaran kesetaraan gender merupakan salah satu bentuk demokratisasi yang spesifik gender.

Sehingga menurut penjelasan Walby tentu berbeda dengan apa yang terjadi di DPW PKS Jawa Timur karena dalam beberapa fakta yang terlihat, seperti dokumentasi dalam kegiatan Rapimwil hanya terdapat tiga perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sehingga menurut penulis, PKS memiliki program yang bagus dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Tetapi dalam pengambilan kebijakan maupun rapat-rapat penting, peran perempuan masih minim partisipasi. Pendapat penulis rupanya memiliki perbedaan, karena Bu Lina memberikan validasi mengapa Rapimwil dalam dokumentasinya terlihat minim perempuan dan adanya wawancara dari Bu Lina mengenai dokumentasi Rapimwil, sebagai berikut:

[117] Wawancara dengan Irwan Setiawan, tanggal 2 Mei 2023 di Kantor DPW PKS Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Jadi gini kalau rakernas kemarin undangannya di masing-masing DPW ada kuotanya, kalau Jawa Timur itu termasuk DPW ada 12 anggota termasuk saya, jadi termasuk memang disitu ada yang diundang BPH (ketua, sekretaris, bendahara, bidang kaderisasi). Kemudian di PKS itu kan ada 14 Bidang ya, Ketua Bidang yang perempuan hanya BPKK dan Bidang. Kemudian rapimwil yang itu memang diadakan untuk menyampaikan hasil rakernas ke daerah jadi rapimwil yang diundang yakni pengurus bidang DPW ya itu BPH dan Ketua Bidang, Ketua DPD dan Sekretaris, dan itu memang banyak bapak-bapak, tetapi bukan karena PKS tidak ramah gender tetapi karena potensi para laki-laki memiliki waktu yang lebih lama dari perempuan, bisa sampai malam gitu dan energinya juga bisa lebih. Lalu ibuk-ibuk menempati pos-pos yang bisa dilakukan sesuai dengan ranah domestik dan ranah publiknya. Sehingga jadi yang di Rapimwil juga begitu ya."[118]

Lovenduski mengutip pernyataan Phillips bahwa meskipun perempuan hadir dalam rapat-rapat yang mayoritas laki-laki, memang kehadiran tersebut pasti mempengaruhi pertimbangan pula, tetapi Philips juga tidak menguji lebih jauh bahwa berapa banyak perempuan yang diperlukan agar suara mereka dapat berarti untuk dipertimbangkan.[119] Hal tersebut apabila penulis analisis sesuai

[118] Wawancara dengan Lina Ariani, tanggal 22 Februari 2023 di Kediaman Bu Lina.
[119] Joni Lovenduski, Hal. 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pernyataan Bu Lina mengenai Rapimwil bahwa hal tersebut sesuai dengan Philips yang mengatakan sedikit banyak kehadiran perempuan pasti akan mempengaruhi pertimbangan pula, tetapi karena Philips belum menguji lebih lanjut mengenai kehadiran dan penulis tidak menemukan adanya "berapa banyak perempuan dibutuhkan".

Lalu Lovenduski juga memaknai tentang adanya perbedaan keterwakilan[120] yang mana menurut penulis Lovenduski mencoba melihat keterwakilan dari sisi yang berbeda, artinya meskipun kader perempuan di PKS jabatan tertinggi dalam partai itu hanya sampai Bendahara tetapi sisi positifnya adalah perempuan dianggap lebih kompeten untuk mengatur dan mengurus soal keuangan dalam partai, artinya kader-kader lain percaya bahwa perempuan dianggap mampu untuk mengelola keuangan.

Rapimwil sendiri diadakan pada 12 Mei 2023 yang mana mereka berkomitmen untuk mensukseskan program merangkul milenial dan juga PKS melek digital. Program PKS tersebut sudah bagus dalam usaha mereka untuk meningkatkan suara tetapi sangat disayangkan bahwa mayoritas yang mengikuti Rapimwil yakni laki-laki.

Pada 2023-2024 mendatang BPKK memeiliki beberapa agenda yang direncanakan akan mereka wujudkan, sebagai berikut:

[120] Joni Lovenduski, Hal. 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.8

Rencana Aksi Pemenangan 2023-2024

Diklat Pendulangan suara berbasis keluarga dan simpul masa (untuk pengurus BPKK dan koordinator titik RKI)
Pembentukan Relawan Perempuan di setiap titik RKI
Pembentukan titik RKI baru (target 1400 titik)
BPKK DPC Silaturahim tokoh/lembaga tingkat RT/RW untuk membangun jejaring sosial
Optimalisasi kegiatan RKI di setiap titik RKI (terus merawat dan menambah anggota)
PKSM Rutin ke BPKK DPD

Sumber: Power Point BPKK DPW PKS Jawa Timur

Dari adanya rencana aksi pemenangan tersebut, Diklat Pendulangan suara termasuk ke dalam strategi PKS dalam mempersiapkan kader-kader mereka khususnya kader perempuan untuk dapat bersaing serta memenangkan kontestasi pada pemilu 2024.

2. Tahapan rekrutmen PKS

Pada rumusan masalah yang sudah tertera pada Bab 1, penulis menjabarkan lebih rinci bagaimana penulis ingin membahas pula mengenai tahapan rekrutmen pada partai politik. Partai politik memiliki peran strategis dalam proses demokrasi. Partai politik bukan sekedar struktur institusi politik yang tujuannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah untuk mendapatkan kekuasaan dan status politik, tetapi juga alat atau instrumen warga negara untuk menyampaikan aspirasi yang mana nantinya partai

politik berusaha mewujudkan aspirasi masyarakat dengan kapasitas mereka sebagai partai politik. Salah satu tugas partai politik adalah rekrutmen politik yang terarah untuk menyiapkan kader partai sebagai persiapan mereka dalam kepemimpinan dan jabatan secara politis. Singkatnya, partai politik menjadi ajang rekrutmen politis yang nantinya partai tersebut mempersiapkan pemimpin masa depan di tingkat lokal dan nasional untuk memenuhi aspirasi masyarakat.[121]

Mengkaji dari buku Katz dan Crotty yang ada di sub-bab kajian teori mengenai 3 kategori perekrutan tersebut yang pertama yakni mengenai syarat, syarat dari PKS untuk masyarakat yang ingin bergabung di PKS seperti pada wawancara yang dilakukan kepada Irwan Setiawan selaku Ketua DPW PKS Jawa Timur adalah sebagai berikut:

> "Nanti ketahuan DPC nya dimana, Nah kita akan kontak DPD yang bersangkutan, nanti DPD yang bersangkutan akan komunikasi dengan DPC sehingga nanti ada verifikasi, asal punya KTP tidak harus syarat-syarat yang rumit untuk menjadi anggota PKS."[122]

[121] Wawan Handika, *"Skripsi: Pola Rekrutmen Politik Pada Partai Politik (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Lombok Barat)"*, 2022, Hal. 1.
[122] Wawancara dengan Irwan Setiawan, tanggal 2 Mei 2023 di Kantor DPW PKS Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu ada juga pedoman dari AD/ART PKS mengenai perekrutan yang termaktub dalam BAB IV Pasal 10 ayat 1 yang berisi, "Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi Anggota Partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Hal tersebut berarti PKS tidak memiliki kriteria tertentu untuk dapat bergabung menjadi anggota PKS, asal memiliki KTP saja dapat bergabung dengan PKS. Pendaftaran tersebut dapat diakses oleh semua orang melalui laman resmi https://jatim.pks.id/ .

Lalu kategori kedua yakni "siapa yang mencalonkan", dalam hal ini Pak Abdul Rahman menjelaskan menjadi 3 bagian, sebagai berikut:

> "Yang pertama setiap anggota terdorong dan didorong untuk sosialisasi ke masyarakat dari yang dekat dan terdekat, misalnya para anggota laki-laki maka sudah seharusnya mereka mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya dan mengkondisikan anak-anaknya tentunya yang sesuai dengan aturan undang-undang yaitu usia 17 punya ktp, lalu kemudian digabungkan ke partai kemudian dibina, tetapi kembali lagi ke keinginan masing-masing mau bergabung atau tidak."[123]

Pada wawancara bagian yang pertama ini Bidang Kaderisasi merekrut kader-kadernya dari keluarga terlebih dahulu, jadi sudah dipersiapkan untuk mengajak kerabatnya agar masuk ke PKS, untuk bergabung atau tidaknya tergantung

[123] Wawancara dengan Abdul Rahman Shaleh, tanggal 2 Juni 2023 di DPW PKS Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemauan dari kerabatnya sendiri. Jadi meskipun terdengar “oligarki” tetapi kembali lagi keputusan mau bergabung atau tidak tergantung masing-masing pribadi. Tetapi hal tersebut berbeda dengan gagasan Ani Soetjipto yang dikutip oleh penulis pada sub-bab kajian teori yang mana Ani mengatakan seringnya tata cara perekrutan bersifat tidak transparan dan mengandung kekerabatan yang akan membahayakan demokrasi di Indonesia. Tetapi menurut pendapat pribadi penulis terhadap gagasan Ani, memang banyak kasus apabila perekrutan yang bersifat keluarga biasanya melanggengkan oligarki sampai pada taraf pendistribusian kader untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan tetapi Pak Abdul Rahman mengatakan bahwa semua kembali ke keinginan masing-masing.

> “Yang kedua ke tetangga, karena kita partai islam jadi tentu saja silaturahim ke tetangga suatu keharusan, karena kalau kita tidak kenal dengan tetangga ya bagaimana bisa kita membesarkan partai. Berbicara dengan tetangga juga tidak langsung membahas partai, tetapi ya sebagaimana biasanya membahas sekolah anak terlebih dahulu, membahas keseharian seperti itu. Kalau misal ke tetangga kan ngobrolnya bisa berulang-ulang ya, jadinya bisa lebih mudah membangun kenyamanan terlebih dahulu. Nanti kalau mereka sudah nyaman, nah berikutnya mungkin kita bisa pakai atribut PKS,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setidaknya dengan kita menggunakan atribut misalnya kaos ya nanti mereka akan terpancing bertanya mengenai PKS."[124]

Pada bagian kedua ini, Pak Abdul Rahman menjelaskan rekrutmen selanjutnya yakni mengajak tetangga sekitar, tetapi sama seperti penjelasan bagian pertama bahwa keputusan untuk bergabung dengan PKS kembali ke masing-masing pihak.

"Yang ketiga sama seperti yang pertama ya, kalau yang pertama ke keluarga, lalu yang kedua ke tetangga, nah yang ketiga ini bisa ke teman, ya mungkin teman angkatan sekolah, angkatan kuliah. Jadi kita tidak perlu mengajak, karena zaman kan sudah canggih ya, jadi kita cukup share-share mengenai PKS di whatsapp di Instagram dan medsos yang lainnya ya, siapa tau nanti dari 40 kontak di whatsapp misalnya ada yang melabuhkan hati ke PKS 5 orang kan alhamdulillah ya, jadi lewat share-share itu nanti mereka misalnya tanya-tanya soal PKS terus bersedia untuk menghubungi saya kan alhamdulillah. Bisa juga mendaftarkan diri melalui web pks ya, jadi nanti ada isi form untuk daftar anggota di web resmi DPW PKS Jatim tadi."[125]

[124] Wawancara dengan Abdul Rahman Shaleh, tanggal 2 Juni 2023 di DPW PKS Jawa Timur
[125] Wawancara dengan Abdul Rahman Shaleh, tanggal 2 Juni 2023 di DPW PKS Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bagian ketiga ini Pak Abdul Rahman menjelaskan apabila rekrutmen di PKS tidak hanya bersifat manual, melainkan bisa juga melalui media sosial dan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota PKS juga bisa melalui platform resmi DPW PKS Jawa Timur.

Dari ketiga bagian wawancara tadi memang berbeda dengan kategori kedua yang dipaparkan oleh Katz dan Crotty dalam *Handbook Partai Politik*, mereka berpendapat bahwa apabila rekrutmen berasal dari keluarga atau bersifat kekerabatan maka hal tersebut sama saja tidak demokratis, karena dikhawatirkan apabila mengambil keputusan tidak bisa adil karena pada saat rekrutmennya sangat kekerabatan. Lalu ketiga wawancara tersebut juga berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Joni Lovenduski pada Kerangka Teori Bab B, Lovenduski mengatakan bahwa dipilihnya seseorang untuk menjadi kandidat partai yang pertama karena adanya pengalaman mereka dalam keanggotaan dan lain sebagainya, tetapi dalam wawancara tersebut sama sekali tidak disebutkan "harus ada pengalaman" dari kandidat untuk dapat masuk ke PKS. Lalu disebutkan juga oleh Lovenduski bahwa kandidat haruslah memiliki cita-cita agar partai tersebut mau untuk menerima, tetapi dari ketiga bagian wawancara tadi sama sekali tidak disebutkan bahwa rekruter harus mencari kandidat seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Lovenduski. Terakhir, proses pengerucutan kandidat dan juga seleksi untuk masuk ke partai juga tidak disebutkan oleh PKS.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah perekrutan yang dijelaskan oleh Pak Abdul Rahman tentunya terdapat proses kaderisasi yang dilaksanakan oleh kader-kader guna untuk pendistribusian kader-kader tersebut ke jenjang pemilu. Kaderisasi merupakan kebutuhan internal partai politik yang harus dilaksanakan. Layaknya sebuah hukum alam, ada proses perputaran dan pergantian disana. Namun satu yang perlu kita pikirkan, yaitu format dan mekanisme yang komprehensif dan mapan, guna memunculkan kader-kader yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang manajemen organisasi, tapi yang lebih penting adalah tetap berpegang pada komitmen sosial dengan segala dimensinya. Sukses atau tidaknya sebuah institusi dapat diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal yang di kembangkannya. Karena, wujud dari keberlanjutan partai adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika organisasi untuk masa depan.[126]

Dalam hal ini proses kaderisasi juga tentunya dilaksanakan oleh PKS sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Abdul Rahman pada sesi wawancara, sebagai berikut:

> "Jadi PKS ini berusaha agar pola kaderisasi ini tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 dan juga bersifat transparan ya karena kan Pancasila sila ke-4 itu harus musyawarah mufakat dan kita meyakini itu. Prosesnya sendiri

[126] Desy Susilawati, Skripsi: *Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Golkar dan NasDem di Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasah Dusturiyah)*, 2021, Hal. 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling utama yaitu menanamkan keyakinan bahwa agama kita (islam) adalah agama yang benar dengan tidak menyalahkan agama yang lain. Dengan meyakinkan anggota bahwa agama islam ini mengajarkan keadilan, kesejahteraan, persatuan dan kesaudaraan, harus merasa benar dengan agama yang dianutnya, dan tanpa menyalahkan agama lain karena nanti akan menjadi permusuhan. Lalu yang kedua yaitu melalui Tabligh dan Tak'lim, tabligh ini ya kajian umum bisa diikuti siapa saja ya kalau ta'lim itu biasanya rutin 1 bulan sekali. Nanti ya dari kajian-kajian rutin itu mungkin ada yang tertarik kemudian dibina. Jadi kita membina misalnya 10 atau 8 orang nah hal tersebut kan jadi lebih fokus itu kalau di PKS namanya UPA Unit Pembinaan Anggota ya, lalu kemudian juga mereka lebih terpantau, dan mereka pun boleh dikatakan sudah diatur sesuai jenjangnya dan sesuai tingkatannya."[127]

Dari penuturan narasumber diatas dapat diketahui bahwa PKS mengadakan kajian-kajian rutin dari yang membahas topik umum seperti Tabligh, sampai yang membahas kajian dengan topik lebih khusus seperti Ta'lim, PKS juga memantapkan kader-kadernya agar selalu merasa benar terhadap Islam tanpa menyalahkan agama lainnya sesuai dengan kalimat Pak Abdul Rahman diatas.

[127] Wawancara dengan Abdul Rahman Shaleh, tanggal 2 Juni 2023 di DPW PKS Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu PKS juga memiliki tingkatan atau jenjang-jenjang kaderisasi menjadi 3 yakni Pendukung, Penggerak, dan Pelopor. Penulis membagi 3 bagian untuk membahas masing-masing jenjang, sebagai berikut:

> "Anggota Pendukung dibagi 2 yaitu Pemula dan Siaga dengan Pembinanya Namanya iu Fasilitator ya. Pemula itu anggotanya yang cukup dia simpati dan diberi KTA saja nah itu sudah bisa disebut Anggota Pendukung Pemula. Lalu Anggota Pendukung Siaga, sama seperti anggota pemula hanya saja dia lebih aktif sedikit minimal mau datang 1 bulan sekali dalam pertemuan, lalu seperti mendatangi kantor-kantor PKS gitu, mau ke rantingnya seperti itu atau bisa mau untuk mendampingi Anggota Dewan untuk kunjungan kerja nah seperti itu. Nah kalau materinya di Anggota Pendukung ini misalnya ada milad PKS gitu jadi fasilitatornya ngeshare di grup gitu nanti mereka bisa forward lagi gitu, materi-materi sederhana saja."[128]

Dari hasil wawancara bagian pertama diketahui bahwa perjenjangan pertama dimulai dengan Anggota Pendukung, lalu dibagi 2 segmen yakni Pemula dan Siaga. Beda Anggota Pendukung Pemula dan Siaga hanya terletak pada tingkat keaktifannya untuk secara sadar ikut dalam pertemuan 1 bulan sekali dan mau

[128] Wawancara dengan Abdul Rahman Shaleh, tanggal 2 Juni 2023 di DPW PKS Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengunjungi kantor-kantor PKS atau mungkin mendampingi Anggota Dewan melaksanakan Kunjungan Kerja.

> "Anggota Penggerak dibagi menjadi 2 juga yaitu Muda dan Pratama dengan Pembinanya itu Namanya Pembina ya. Kalau yang Anggota Penggerak Muda itu sudah aktif, aktif di pembinaan dengan jumlah yang terbatas tadi ya yang 10 orang atau 8 orang tadi. Jika sudah naik jenjang ke Anggota Penggerak Muda itu dia bisa dapat materi, tadi ya 5 materi sebelumnya jadi bisa lebih intensif, jadi setelah 1-2 tahun dipandang bagus sesuai penilaian jadi bisa naik ke Anggota Penggerak Pratama. Anggota Penggerak Pratama tentu materinya berbeda ya, jadi mereka lebih diajarkan untuk bagaimana *public speaking* gitu, nah nanti setelah 2-4 tahun baru bisa naik ke Anggota Pelopor."

Perjenjangan selanjutnya yakni apabila anggota pendukung sudah mencapai segmen siaga, maka anggota tersebut akan naik menjadi Anggota Penggerak Muda yang mana Anggota Penggerak Muda ini sudah dibagi lebih intensif lagi per pertemuan misalnya 1 kelas hanya diisi oleh 8-10 orang saja, dipisah antara laki-laki dan perempuan, lalu apabila mengharuskan digabung maka pembinanya adalah laki-laki, mereka mendapatkan 5 Materi yang sudah tercantum di KKP atau Kurikulum Kaderisasi Partai milik PKS. 5 Materi tersebut yakni Keagamaan, Kebangsaan, Kepartaian, Kemasyarakatan, dan Kepemimpinan serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewirausahaan. Lalu apabila setelah tahun pertama dan kedua sudah dinyatakan memenuhi indikator keberhasilan menjadi Anggota Penggerak Muda maka selanjutnya akan naik menjadi Anggota Penggerak Pratama, yang mana diajarkan bagaimana cara untuk berbicara di depan umum dan juga untuk menarik hati masyarakat karena kader juga dipersiapkan untuk memimpin tentunya yang mana pembawaan dan cara berbicara di depan umum juga harus dilatih. Setelah dirasa cukup menguasai 5 Materi tadi dan juga kemampuan *public speaking* nya sudah mencapai indikator keberhasilan maka 2-4 tahun setelahnya akan naik menjadi Anggota Pelopor.

> "Anggota Pelopor dibagi menjadi 3 yaitu Madya, Dewasa, Utama Kalau Anggota Pelopor Pembinanya disebut Pembimbing. Jadi kalau sudah Anggota Pelopor ya Namanya saja Pelopor ya pastinya mereka harus berani menggagas sesuatu, menggerakkan sesuatu, harus berani seperti ini. Jadi harapannya sesuai dengan apa yang diinginkan PKS ya untuk menjadi Partai Pelopor bangsa ini ya. Jadi juga selain menjadi Anggota Pelopor ini harus bisa setia, berkomitmen gitu ya."

Jenjang tertinggi dari kaderisasi yakni Anggota Pelopor yang dibagi menjadi 3 segmen dengan indikator keberhasilan masing-masing agar kader dapat naik menjadi Anggota Pelopor Utama, dan siap untuk menjadi calon anggota legislatif.

Dari adanya 3 perjenjangan tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Abdul Rahman sesuai dengan 3 Prinsip Kaderisasi yang digagas oleh Syamsudin yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dikutip oleh penulis di sub-bab kajian teori, bahwa PKS sudah memenuhi prinsip pertama, kedua, dan juga ketiga.

Prinsip pertama yakni terbuka, PKS sudah dikatakan mengikuti prinsip pertama karena dari ketiga jenjang tadi mereka sama-sama mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan PKS, medapatkan KTA, dan juga mengikuti kaderisasi sesuai dengan jenjang yang dimiliki oleh PKS.

Prinsip kedua yakni non-diskriminatif, menurut apa yang dibaca oleh peneliti dari berita yakni PKS Pusat sudah memenuhi hal tersebut, karena dilantiknya Evalina Heryanti menjadi anggota Dewan Pakar yang mana artinya PKS membuka kesempatan untuk seluruh anak bangsa tanpa mengenas suku, ras, agama, golongan, serta waran kulit. Tetapi pada DPW PKS Jatim masih belum penulis ketahui mengenai anggota DPW PKS Jatim yang menganut agama selain islam. Artinya DPW PKS Jatim belum memenuhi prinsip kedua.[129]

Prinsip ketiga yaitu berjenjang, dapat diketahui dari hasil wawancara diatas bahwasannya PKS sudah melakukan perjenjangan atau tingkatan-tingkatan untuk membagi anggotanya berdasarkan kedisipilinan, keloyalan, keaktifan mereka di PKS. Adanya perjenjangan ini menurut penulis juga lebih efektif dan lebih tepat sasaran pula.

Lalu kaderisasi juga dilakukan tidak hanya satu malam untuk menciptakan kader-kader yang sesuai dengan kemauan partai yang tentunya dapat membawa

[129] PKS, "*Evalina Heryanti, Perempuan Kristiani Pakar Olimpiade Gabung Dewan Pakar PKS"*, dilansir dari https://bit.ly/43qG3XK , pada 07 Juni 2023, pukul 03.13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

partai ke arah yang lebih baik tentunya, tak terkecuali PKS. Ketua Bidang Kaderisasi memaparkan bahwa PKS juga mengatakan seberapa sering melakukan pertemuan untuk kader-kadernya, sebagai berikut:

> "Proses Anggota Kaderisasi Penggerak dan Pelopor itu sepekan sekali ya, jadi bisa dihitung sepekan ada 4 nah 4x12 itu. Nah kalau Anggota Pendukung lebih fleksibel, kalau mau 1 bulan sekali itu bisa saja."

Dapat diketahui bahwa ada perbedaan pertemuan antara Anggota Pendukung dengan Anggota Penggerak dan Anggota Pelopor. Hal tersebut karena dibagi menurut keaktifan anggotanya, Anggota Penggerak dan Pelopor karena mereka sudah lebih intensif maka harus diadakan proses kaderisasi mereka sepekan sekali, tetapi untuk Anggota Pendukung hanya 1 bulan sekali saja.

Dalam melakukan proses kaderisasi tentunya diwarnai dengan beberapa kendala karena membentuk dan melatih manusia lebih susah apalagi manusia diberikan kelebihan yakni berakal, Pak Abdul Rahman menjelaskan kendala-kendala yang dialami oleh PKS pada saat melakukan kaderisasi, sebagai berikut:

> "Kendalanya saya rangkum jadi 3 sesuai pengalaman saya sebagai Ketua Bidang Kaderisasi. Yang pertama ekonomi, misalnya gajinya pas untuk menghidupi keluarganya, lalu ditambah harus kumpul untuk pembinaan kan butuh ongkos juga akhirnya itu menjadi kendala. Yang kedua masalah pekerjaan misalnya saja pembinaan kaderisasi diadakan hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sabtu, tetapi kan ada yang bekerja pada hari sabtu dan dia punya atasan, jadi misalnya tidak diizinkan untuk ambil hari libur sabtu buat pembinaan kan termasuk kendala. Lalu yang terakhir masalahnya itu berasal dari personal, misalnya saja tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, apabila pendapat orang lain yang lebih banyak disepakati dari pendapat dia nanti dia jadinya ngambek, hal tersebut menurut saya juga termasuk kendala ya."[130]

Dari penuturan narasumber diatas dapat penulis rangkum ada 3 kendala yang paling sering menghambat proses kaderisasi di PKS, yang pertama permasalahan ekonomi, yang kedua karena pekerjaan, yang terakhir karena pembawaan pribadi. Menurut penulis ketiga permasalahan tersebut memang permasalahan yang umum dialami oleh manusia, oleh sebab itu memaklumi beberapa kali mungkin bisa diterapkan oleh Pak Abdul Rahman terhadap masalah tersebut.

Dalam hal ini perempuan dan laki-laki di PKS pada proses kaderisasi dipisah untuk rombelnya, seperti yang sudah dijelaskan penulis. Tetapi pemisahan tersebut apakah sampai disitu saja? Ataukah posisi laki-laki disini lebih mendominasi? Hal tersebut akan dijelaskan oleh Pak Abdul Rahman berikut ini:

"Secara kurikulum sama, tetapi secara tugas berbeda. Contoh begini laki-laki diizinkan menginap seperti perkumpulan

[130] Wawancara dengan Abdul Rahman Shaleh, tanggal 2 Juni 2023 di DPW PKS Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> UPA 8-10 orang tadi tetapi perempuan kan tidak bisa menginap karena ya punya keluarga, punya anak gitu ya jadi harus mengurus keluarganya dan lain sebagainya. Kalau perkumpulan UPA tadi laki-laki ya dibina laki-laki, perempuan ya dibina perempuan jadi dipisah. Misalnya ada yang anggota intensifnya hanya sedikit misalkan 4 orang dan mengharuskan untuk dicampur ya tetap dibina oleh laki-laki ya."

Dapat diketahui bahwa dari pernyataan diatas laki-laki tetap lebih mendominasi di PKS. Pada halaman 33 penulis sudah mengutip tulisan Joni Lovenduski yang mengatakan bahwa untuk mencapai perbaikan peningkatan keterwakilan perempuan dipersiapkan dari partai politik itu sendiri. Jika melihat dari pernyataan diatas, PKS belum menaruh kepercayaan untuk melakukan proses kaderisasi jika dipimpin oleh perempuan. Meskipun PKS memiliki BPKK sebagai bukti bahwa PKS serius mengenai pemasalahan perempuan dan juga keluarga. Tetapi dari pemaparan diatas dapat diketahui juga bahwa PKS belum siap untuk memberikan kepercayaannya di pundak kader perempuan untuk dapat memimpin rombel kaderisasi. Hal tersebut sangat disayangkan, dengan segala bentuk *branding* keramahan gender yang diusung oleh PKS melalui BPKK seharusnya PKS sudah memiliki kepercayaan untuk membiarkan kader perempuannya memimpin proses kaderisasi tersebut apabila pengetahuan serta wawasan kader perempuan tersebut dirasa mampu untuk memimpin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah adanya pembahasan mengenai proses rekrutmen sampai kaderisasi, selanjutnya adalah membahas mengenai representasi perempuan dalam partai politik. Dari informasi yang telah penulis peroleh melalui website KPU Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:[131]

Tabel 4.9

Keanggotaan PKS 2020-2025

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Irwan Setiawan
2.	Sekretaris	Ahmadi
3.	Wakil Sekretaris	Mochamad Frimainto Utomo, S.I.P.
4.	Bendahara	Lilik Hendarwati
5.	Wakil Bendahara	Heri Santoso
6.	Anggota	Naimah
Bidang Kaderisasi		
7.	Ketua	Abdul Rahman Shaleh
8.	Sekretaris	Helmi, S.Si
9.	Anggota	Chanifah, S.Si, Apt.
10.	Anggota	Ratih Anggraeni
Bidang Kepemudaan		

[131] Portal dan Publikasi Pemilu dan Pemilihan KPU Provinsi Jawa Timur, Dilansir dari https://bit.ly/3PWU8YO , pada 10 Juli 2023, pukul 17.35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11.	Ketua	Dian Heri Setiawan
12.	Sekretaris	Irvan Dwi Kurnianto
Bidang Seni Dan Budaya		
13.	Ketua	Amir Gunawan
14.	Sekretaris	Sugito
15.	Anggota	Novi Istina
Bidang Kepanduan		
16.	Ketua	Zainul Arifin
17.	Sekretaris	Akhdiyat Syabril Ulum
18.	Anggota	Kosiah
Bidang Perempuan Dan Ketahanan Keluarga		
19.	Ketua	Lina Ariani
20.	Sekretaris	Heru Sri Kusumayanti
21.	Anggota	Noor Fitria Azzahra, S.Kom., M.Kom.
22.	Deputi Ketahanan Keluarga	Rokhmatun, S.T.

Dalam hal ini penulis mendapatkan adanya data mengenai keanggotaan PKS Jawa Timur, yang mana penulis menemukan bahwa dari hasil tabel tersebut keanggotaan PKS sudah melampaui 30% tetapi disetiap bidang ternyata masih belum memenuhi keterwakilan perempuan karena seharusnya disetiap bidang terdapat setidaknya ada keterwakilan perempuan untuk menyeimbangkan pengambilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan pada setiap bidang. Contohya saja pada bidang kepemudaan yang hanya terlihat 2 laki-laki saja hal tersebut belum mencukupi adanya keterwakilan perempuan dalam beberapa bidang pada keanggotaan PKS.

Padahal seharusnya apabila mengutip dari pembicaraan Ketua DPW PKS Jawa Timur bahwa setiap bidang sudah ada keterwakilan perempuan, tetapu dalam beberapa bidang masih terlihat minim keterwakilan perempuan, hal tersebut dikhawatirkan kurang terakomodasinya keterwakilan perempuan baik didalam internal PKS maupun ketika membuat program kerja yang mengusung mengenai perempuan.

Dilansir dari website resmi PKS, Ketua DPW PKS Jawa Timur mengatakan bahwa terdapat 120 Bakal Calon Anggota Dewan atau BCAD yang telah didaftarkan, terdapat sebanyak 44 caleg perempuan dari 120 bakal calon anggota dewan tersebut, artinya sebanyak 37% perempuan dari total BCAD. Hal tersebut artinya PKS sudah mengusung sebanyak lebih dari 30% keterwakilan perempuan untuk didistribusikan dalam kontestasi.[132]

3. Strategi PKS dalam mempersiapkan kader perempuan untuk Pemilu 2024

Masing-masing partai politik berhak mempunyai dan menetukan strategi politik serta memilih kader berkualitas guna mendapat simpatisan dari masyarakat dan mendapatkan atau memperoleh suara masyarakat, dimana strategi politik ini

[132] PKS, *"Daftarkan 120 Caleg DPRD, Ketua PKS Jatim: Optimis Raih Target 15 Persen Kursi"*, dilansir dari https://bit.ly/3OdLsfJ , pada 13 Juli 2023.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai penentu kemenangan dan pada tiap pelaksanaan pemilu. Strategi politik merupakan cara untuk merealisasikan tujuan politik. Biasanya, strategi politik dipergunakan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan, terutama dalam pemilu. Strategi politik terkait pada strategi kampanye guna mencapai hasil yang maksimal. Strategi politik dapat dianalisi dari berbagai aspek, yaitu: proses perencanaan, bentuk strategi politik, serta pelaksanaan strategi politik tersebut.[133] Adanya strategi ini nantinya akan berisi rencana yang akan dilaksanakan melalui serangkaian komitmen, dan tindakan yang tertata, serta terkoordinasi dengan baik guna mencapai hasil yang diinginkan[134]

Dalam hal ini PKS juga tentunya memiliki strategi yang sudah direncanakan serta dirancang baik oleh PKS maupun masing-masing caleg agar nantinya PKS dapat memperoleh suara yang signifikan dari pemilu lalu. Dalam hal ini penulis memaparkan strategi dari Bu Lina melalui wawancara yang dilakukan bersama Bu Lina sebagai berikut:

> "Jadi di PKS ini biasanya ada penugasan dan penugasan ini baru disahkan Januari kemarin karena sebelumnya juga masih belum ada kejelasan mau ditempatkan di dapil kabupaten kota atau provinsi saya. Jadi di PKS tepatnya BPKK sesuai yang

[133] Intan Trisha Anggraeni, Strategi Pemenangan Kevin Mahesa Amuwardhani Pada Pemilihan Umum Calon Legislatif Di Kota Magelang Tahun 2019, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 11 No. 4, 2022, Hal. 7.

[134] Firdausi Nuzulla Isnainy dan Trenda Aktiva Oktariyanda, Manajemen Strategi Pemenangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Dalam Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2019, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Publika*, Vol. 10 No. 2, 2022, Hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah saya jelaskan ada strategi untuk pembekalan. Jadi diberi pembekalan tentang bagaimana mendapatkan suara, bagaimana mencari serta mengelola relawan. Jelas kalau saya strateginya yang pertama adalah dukungan dari keluarga karena saya punya suami."[135]

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa PKS ini sangat lekat dengan *branding family first*-nya melalui statement-statement dari narasumber yang sudah penulis wawancarai diatas, Bu Lina mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan, strategi yang digunakan PKS merupakan pembekalan untuk kader perempuan dengan pendidikan politik. Pak Irwan juga menambahkan mengenai pendidikan politik, sebagai berikut:

"Jadi pendidikan politik ini tidak hanya melalui pembekalan saja, mereka juga harus melek digital sebagai peningkatan kapasitas mereka."

Pendidikan politik berfungsi sebagai sarana bagi kader untuk meningkatkan kualitas individu, karena dalam pendidikan politik kader dibekali oleh materi-materi yang diberikan oleh partai. Materi tersebut yakni Keagamaan, Kebangsaan, Kepartaian, Kemasyarakatan, dan Kepemimpinan serta Kewirausahaan. Lalu PKS juga membekali kadernya bagaimana cara untuk

[135] Wawancara kembali dengan Lina Ariani, tanggal 19 Mei 2023 di Kediaman Bu Lina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan suara, serta mengelola relawan yang mana hal tersebut sangat berguna untuk mempersiapkan kadernya dalam menghadapi kontestasi 2024.

Menanggapi wawancara Bu Lina diatas strategi pertama yang beliau lakukan agar dapat memenang kan pemilu mendatang yakni dengan izin dari suaminya. Dalam menanggapi hal tersebut menurut Lovenduski termasuk dalam rintangan perempuan untuk terjun di dunia politik, Lovenduski membagi 3 rintangan yang dikutip oleh penulis pada sub-bab kajian teori. Pada rintangan kedua, Lovenduski mengatakan bahwa kesulitan perempuan berasal dari adanya kekangan yang berasal dari keluarga, lalu hambatan yang datang dari kewajiban perempuan mengurus keluarganya (apabila sudah berkeluarga) yang mana hal tersebut menurut Lovenduski menjadi salah satu rintangan yang dihadapi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Tetapi menurut penulis sendiri keluarga bukan hambatan perempuan berkiprah dalam dunia politik, asal perempuan tersebut dapat memanajemen waktunya dengan baik. Lebih lanjut artinya PKS mendomestikasi peran perempuan yang lebih banyak berada pada ranah rumah tangga, melalui pemaparan diatas bahwa strategi yang paling utama dari kader perempuan adalah harus adanya izin dari suami atau keluarga. Padahal selama melakukan wawancara, kader-kader tidak menyebutkan bahwa hal serupa juga dilakukan oleh laki-laki terhadap keluarganya.

Dalam hal ini narasumber juga memaparkan bahwa strategi yang lainnya yakni peran dari BPKK melalui RKI yang diharapkan agar dapat membantu untuk mendulang suara PKS. Bu Lina juga menambahkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Bidang perempuan secara khusus ada garis organisasi dengan BPKK Pusat dan disitu sudah ada pelatihan juga terkait dengan bagaimana perempuan dapat berkiprah di politik. Kalo strategi secara struktural yang berkaitan dengan BPKK ada program RKI. Kemudian saya juga mengawal, artinya pasti kegiatan yang kami lakukan kita niatkan untuk membantu masyarakat. Jadi kita berharap selain kita membantu masyarakat, semoga masyarakat juga mau membantu menaikkan suara PKS sehingga keterwakilan PKS bisa meningkat, kalau suara kita kurang di Parlemen kan kita jadi tidak bisa mengawal kebijakan-kebijakan untuk masyarakat."[136]

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa strategi dari narasumber sendiri diperuntukkan untuk memperluas serta menembus pasar, yang mana hal tersebut dilakukan Bu Lina melalui BPKK yakni programnya yaitu RKI. Mengapa demikian? Karena dengan meluasnya pembinaan RKI ini, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak keluarga yang tidak jadi bercerai, remaja yang tidak tumbuh dengan *mental health*, pembelajaran parenting yang membantu dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat menjadi tren positif bagi PKS sendiri khususnya Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga.

[136] Wawancara kembali dengan Lina Ariani, tanggal 19 Mei 2023 di Kediaman Bu Lina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu narasumber yang lain juga menyebutkan mengenai strategi dan kampanyenya untuk 2024, sebagai berikut:

> "Bagi PKS karena memang tugas sebagai partai politik tak pernah berhenti memberikan pencerahan kepada masyarakat kita tentang politik. Pendekatan yang bisa kita lakukan memang ketika kita betul-betul mau turun dan menunjukkan bukti nyata bahwa partai politik itu tidak semuanya hanya pragmatis datang mencari suara pada saat mendekati pemilu saja. Kita itu peduli dengan masyarakat dan kita itu memperjuangkan mereka. kami juga memberikan pelajaran politik kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui kalau memilih itu perlu karena kita melihat bahwa masyarakat kita ini masih banyak yang tidak memprioritaskan memilih sehingga potensi suara hanya 60 sampai 70% yang punya mencoblos yang datang ke TPS."[137]

Dari pemaparan tersebut narasumber tidak secara langsung menyebutkan strateginya, tetapi menurut penulis strategi yang dilakukan oleh narasumber itu sendiri dengan mengajak masyarakat melek politik dengan apa yang dipilihnya, memberikan masyarakat mengenai pendidikan politik dan hal tersebut tentunya termasuk strategi menurut penulis dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat tentunya.

[137] Wawancara dengan Lilik Hendarwati, tanggal 21 Februari 2023 di DPW PKS Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain adanya *branding* dari 2 kader yang diusung menjadi caleg 2024 mendatang, PKS juga memiliki strategi tersendiri untuk menarik minat masyarakat memilih maupun bergabung di PKS, hal tersebut dipaparkan oleh Pak Irwan berikut ini:

> "Salah satunya perempuan ini kita jadikan bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek. Jadi pertama kita mengajak perempuan itu menjadi subjek karena kita memiliki RKI yang tersebar di semua Kecamatan di Jawa Timur sudah ada 800. Yang kedua milenial juga kita jadikan pemuda sebagai subjek bukan sebagai objek, bukan semata-mata mereka untuk memilih PKS tetapi ayo bareng-bareng apa yang bisa kamu lakukan untuk bangsa ini."

PKS tidak secara langsung dan detail dalam memaparkan mengenai strategi-strategi yang mereka usung untuk mempersiapkan kader perempuannya dalam pemilu 2024, tetapi penulis merangkum beberapa strategi yang secara tidak lansgung PKS sebutkan baik dalam data wawancara, maupun dokumentasi. Dapat penulis rangkum bahwa strategi PKS sendiri ada 4, yang pertama yaitu PKS memberikan pembekalan mengenai bagaimana cara mengelola relawan. Dalam hal ini mengelola relawan merupakan satu hal yang cukup penting bagi kader yang ditugaskan untuk menjadi pejabat publik, terlebih lagi jika ditugaskan pada lembaga legislatif. Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga eksekutif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki batasan 2 periode, berbeda dengan lembaga legislatif yang tidak memiliki batasan periode dalam menjabat.

Sistem tersebut membuat kader yang ditugaskan sebagai anggota dewan harus mampu mengelola relawan sebaik mungkin agar tetap setia berjuang terhadap setiap kontestasi politik yang dijalani. Mengelola relawan berarti tidak meninggalkan relawan ketika sudah menjadi pejabat publik, karena seringkali kader yang sudah menjadi pejabat publik melupakan rakyat yang mendukung bahkan relawan juga termasuk satu hal yang terlupakan. Sehingga hal tersebut berakibat kepada berkurangnya seseorang yang setia berjuang terhadap kontestasi selanjutnya.

Dalam hal ini mengelola relawan berarti kader yang terpilih menjadi pejabat publik harus senantiasa menjaga relawan agar tetap setia terhadapnya, hal tersebut bisa dengan selalu datang terhadap setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh relawan, bisa juga dengan menjadi donator maupun narasumber pada kegiatan tersebut. Hal lain yang membuat relawan setia adalah membantu mereka ketika sedang membutuhkan pertolongan, sehingga relawan tidak merasa terlupakan dan tidak merasa hanya dijadikan sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan. Menurut penulis adanya pembekalan dari PKS mengenai cara mengelola relawan termasuk hal penting, agar pada saat kontestasi periode berikutnya dapat mempertahankan kursi yang telah diraih.

Kemudian strategi kedua yaitu mengenai diklat pendulangan suara serta diklat pemenangan suara. Adanya diklat tersebut diharapkan agar kader PKS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang akan menjadi pejabat publik dapat semaksimal mungkin untuk memetakan atau mapping agar kader dapat bersaing dengan kandidat-kandidat dari partai lainnya. PKS pun diharapkan dapat menggunakan metode komunikasi yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat, hal tersebut agar pesan yang diusung oleh PKS dapat tersampaikan. Dengan adanya pembekalan mengenai diklat pendulangan serta diklat pemenangan suara, PKS berharap agar kadernya dapat semaksimal mungkin mengimplementasikan materi yang telah dilakukan PKS pada diklat tersebut supaya suara PKS dapat naik dengan signifikan.

Lalu strategi ketiga yaitu adanya Optimalisasi kegiatan RKI. Seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa salah satu strategi PKS dalam mempersiapkan kader perempuannya yaitu lewat program unggulan BPKK yang bernama RKI atau Rumah Keluarga Indonesia. Kegiatan RKI selalu berjalan dengan konsisten untuk membantu masyarakat mengokohkan keluarga, selain itu RKI juga membantu kader perempuan PKS untuk lebih aktif membantu masyarakat. Sehingga kegiatan RKI tersebut tidak semata-mata menjadi aktif ketika menjelang pemilu saja, tetapi lebih dari itu kegiatan tersebut selalu konsisten meskipun jauh dari pemilu. Namun ketika menjelang pemilu, kegiatan RKI harus lebih dioptimalkan lagi dengan tujuan untuk meraih simpati masyarakat.

Yang terakhir adanya Optimalisasi konten medsos yang dibekali oleh PKS kepada kader perempuannya. Dewasa ini, media sosial membuat mayoritas masyarakat lebih mudah untuk mengakses sesuatu. Pembekalan ini mewajibkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kader perempuan yang akan menjadi pejabat publik harus lebih sering meng-upload konten-konten menarik, contohnya seperti kader perempuan A dalam 1 minggu dapat meng-upload konten-konten mereka mengenai kegiatan mereka selama mensosialisasikan RKI ke masyarakat, hal tersebut dapat dilakukan kemudian dengan menyisipkan pesan-pesan positif yang dapat menarik perhatian masyarakat. Karena adanya optimalisasi konten medsos dapat meminimalisir pengeluaran *budget* kampanye yang berlebihan, oleh sebab itu penyuluhan yang dilakukan oleh PKS mengenai optimalisasi konten medsos ini menjadi strategi yang digunakan PKS untuk mempersiapkan kader perempuannya pada pemilu 2024.

Dalam setiap partai politik memiliki *figure* atau tokoh yang dirasa memiliki tujuan dan juga visi yang sama dalam hal mewujudkan keadilan, kesejahteraan untuk bangsa. Tokoh yang memiliki semangat inspiratif dengan *track record* yang bagus pula dapat dijadikan suatu inspirasi oleh sebuah partai politik untuk diamanahi menjadi sosok yang dirasa mampu mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik. PKS mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mereka. Selain strategi perempuan dalam memenangkan pemilu pada tahun 2024, kader perempuan juga memiliki perspektif dalam memilih calon presiden. PKS memiliki koalisi bersama NasDem dan Demokrat yang bernama Koalisi Perubahan, yang mana hal tersebut dalam struktural partai memang kader diwajibkan penuh untuk mengikuti instruksi serta arahan dari pusat, tetapi Bu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lina memiliki perspektif pribadi dalam menyampaikan pandangannya mengenai Anies Baswedan sebagai capres usulan PKS, sebagai berikut:

> "Kalau saya sendiri secara pribadi bisa lihat dari prestasi-prestasi kepemimpinan beliau ya di Jakarta, kemudian juga beliau memiliki kepribadian yang baik dan Insya Allah bisa jadi pemimpin tidak hanya di Jakarta tetapi juga di skala Negara. Kita juga tau bahwa memang untuk menentukan pemimpin kan tidak mudah ya. Kita berharap bahwa, PKS kan sudah memiliki platform pembangunan dari sisi ekonomi, kemudian berkaitan dengan bidang perempuan, keluarga, dan, anak nah itu Insya Allah sudah bisa tergambarkan profilnya Pak Anies beliau sosok yang bisa bersama-sama menjalin dan mewujudkan bangsa Indonesia untuk ke depannya lebih baik"[138]

Pak Abdul Rahman juga memiliki perspektifnya mengenai diusungnya Anies Baswedan sebagai capres oleh PKS, sebagai berikut:

> "Kalau pendapat pribadi saya ya karena tentu saja dari hasil kerja Pak Anies sebelum-sebelumnya ya, jadi track record nya kan bisa diliat bagus gitu jadi itu lah mengapa saya juga mendukung kalau PKS ini mengusung Pak Anies sebagai Capres ya."

[138] Wawancara kembali dengan Lina Ariani, tanggal 19 Mei 2023 di Kediaman Bu Lina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat diketahui bahwa PKS meskipun mengusung Pak Anies, kader-kadernya juga memiliki kesamaan pandangan mengenai Pak Anies yang mana artinya kader-kader PKS juga mendukung diusungnya Anies Baswedan sebagai capres koalisi oleh PKS, NasDem, dan Demokrat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta temuan peneliti dalam penelitian tentang Strategi Pengarusutamaan Gender Partai Politik Studi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di PKS Jawa Timur, penulis mempunyai 3 fokus yang dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu BPKK sebagai strategi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, tahapan rekrutmen politik, dan strategi PKS untuk mempersiapkan perempuan dalam pemilu 2024.

Agenda PKS dalam meningkatkan keterwakilan perempuan serta penguatan perempuan di partai politik yaitu melalui bidang yang memuat khusus mengenai perempuan dan ketahanan keluarga, bidang tersebut bernama Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. BPKK tidak hanya fokus bergerak menangani permasalahan keluarga, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam setiap kegiatan yang ada di PKS. Melalui BPKK, kader perempuan PKS dituntut untuk terjun lebih produktif ke masyarakat guna membantu setiap permasalahan yang ada di masyarakat dan tentunya hal tersebut menjadi pengalaman untuk meningkatkan kualitas dan peran perempuan.

PKS dalam kelembagaan anggotanya sudah memenuhi ambang batas 30% dalam keanggotaannya, tetapi pada setiap bidang masih ada beberapa yang belum memenuhi keterwakilan perempuan. PKS memiliki program responsif gender sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu Peningkatan Kapasitas Anggota Perempuan, hal tersebut dilakukan PKS agar kader perempuannya siap dalam terjun ke masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh PKS.

Tahap rekrutmen PKS dimulai dari keluarga, seperti prinsipnya *family first*. Lalu selanjutnya kader PKS dianjurkan untuk mengajak orang terdekat seperti tetangga, dan juga teman untuk bergabung ke PKS, tetapi PKS juga memiliki website resmi yang memuat form pendaftaran yang terbuka untuk umum. Proses kaderisasi PKS cukup panjang dan berjenjang. Pada saat baru bergabung kader akan memasuki jenjang Anggota Pendukung Pemula yang mana hanya mendapatkan KTA dan belum memasuki materi kaderisasi, kemudian jika sedikit serius seperti bersilaturahmi lebih sering ke kantor PKS akan naik menjadi Anggota Pendukung Siaga. Setelah dirasa sudah lebih disiplin maka akan naik menjadi Anggota Penggerak Muda yang sudah mulai diberikan materi dengan rombel maksimal 10 orang perkelas, lalu 1-2 tahun naik ke Anggota Penggerak Pratama kemudian 3-4 tahun baru naik ke Anggota Pelopor Madya, kemudian Anggota Pelopor Dewasa, dan terakhir Anggota Pelopor Utama.

Strategi PKS dalam mempersiapkan kader perempuan untuk pemilu 2024 yang pertama yakni adanya pembekalan untuk perempuan dibawah naungan BPKK mengenai bagaimana mengelola relawan. Program BPKK yaitu RKI juga menjadi salah satu strategi PKS dalam mempersiapkan kader perempuannya pada pemilu 2024 yang sudah dilakukan melalui Diklat Pemenangan Suara dan Optimalisasi Konten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Medsos. Lalu dibawah naungan BPKK juga, PKS telah merancang strategi pemenangan untuk diusung pada 2023-2024 yaitu Diklat Pendulangan Suara.

B. Saran

Setelah melalui proses yang dilalui oleh penulis dalam meneliti dan juga mendapatkan data untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis merefleksikan beberapa hal yang dibutuhkan oleh DPW PKS Jawa Timur, yang pertama tentunya digitalisasi partai harus memuat mengenai struktur lengkap di website DPW PKS Jawa Timur dari BPH sampai Ketua Bidang selain Kaderisasi karena penulis kesulitan untuk menemukan daftar struktur Ketua Bidang yang ada di DPW PKS Jawa Timur. Saran kedua yaitu agar DPW PKS Jawa Timur memperbanyak kader-kader milenial untuk menjadi wajah-wajah baru di PKS, karena penulis melihat dari struktur BPH PKS, kemudian orang-orang yang berada di kantor PKS penulis belum menemukan adanya anggota milenial disana.

Untuk peneliti berikutnya yang mengupas topik serupa dengan penelitian ini agar bisa menambahkan observasi sebagai metode penelitiannya untuk mengikuti rapat-rapat atau monev dari PKS dan juga untuk dapat mengikuti rapat ataupun ikut andil dalam kegiatan RKI yang diselenggarakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga agar lebih kaya data yang didapatkan dan penelitian dengan topik serupa dapat terbaharukan dengan metode yang ditambahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Budiana, Irwan dkk. *Strategi Pembelajaran.* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). Cetakan I.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Echols, John M. dan Shadily, Hassan. *Kamus Inggris-Indonesia: AnEnglish-Indonesian Dictionary*. (Jakarta: Gramedia, 2019).

Edward, Djony. *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*. (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006). Cet. Pertama.

Katz, Richard S. dan Crotty, William. *Handbook Partai Politik*. (Nusa Media: Bandung, 2014).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender Sebuah Pengantar*. (Jakarta: LIPI Press, 2016).

Lovenduski, Joni. *Politik Berparas Perempuan*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008).

Soetjipto, Ani. Politik Harapan Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi. (Tangerang: Gajah Hidup, 2011).

Soetjipto, Ani dan Adelina, Shelly. *Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati*. (Jakarta Pusat: Parentesis Publisher, 2012).

Syarbaini, Syahrial., Nur, Syurya Muhammad Anom, dan Erman. *Teori, Media, dan Strategi Komunikasi Politik*. (Jakarta: Program Ilmu Komunikasi Esa Unggul Press, 2021).

Tornquist, Olle. *Politics and Development: A Critical Introduction*. (London: Sage Publications, 1999).

Wahyudi, Agustinus Sri. *Manajemen Strategi*. (Jakarta: Binarupa Aksara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Waluyo, Sapto. Kebangkitan Politik Dakwah. (Harakatuna Publising, Bandung, 1996).

Jurnal

Amaliyah, Isyrofah. 2018.Penguatan Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik. *Jurist-Diction*. Vol. 1 No. 1.

Anggraeni, Intan Trisha. 2022. Strategi Pemenangan Kevin Mahesa Amuwardhani Pada Pemilihan Umum Calon Legislatif Di Kota Magelang Tahun 2019. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol. 11 No. 4.

Anzia, Sarah F dan Bernhard, Rachel. 2022. Gender Stereotyping and the Electoral Success of Women Candidates: New Evidence from Local Elections in the United States. *British Journal Of Political Science*.

Aulya, Aziza dkk. 2022. Perempuandan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian. *Jurnal Amanna Gappa*. Vol. 30 No. 2.

Damanik, Renata Dayang Naguratta. 2021. Tinjauan Pengarsutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pelatihan. *Jurnal AgriWidya*. Vol. 2 No. 1.

Effendi, Prihatin dan Ratnasari, Devi. 2018. Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Pro Hukum*. Vol. 7 No. 2.

Efriza. 2019. Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik. *Jurnal Politica*. Vol. 10 No. 1.

Erick, Benni dan Masyitah. 2020. Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar'iyyah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*. Vol. 3 No. 2.

Ferdous, Jannatul. 2019. Representation Of Women In Parliament Of Bangladesh: Is It Hopeful?. *Journal of Governance And Public Policy*. Vol. 6 No. 2.

Harahap, Machyudin Agung, dan Adeni, Susri. 2021. Bahasa Dalam Komunikasi Gender. *Jurnal Profesional FIS Unived*. Vol. 8 No. 2.

Haris, Irham Abdul. 2021. Pembelajaran Responsif Gender dalam Pendidikan Islam. *Jurnal An-Nur: Kajian Pendidikan dan Ilmu Keislaman*. Vol. 7 No. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasanah, Ulfatun dan Musyafak, Najahan. 2017. Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik. Sawwa: *Jurnal Studi Gender*. Vol. 12 No. 3.

Hermina, Dina. 2014. Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan. *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. II No. 1.

Hidayat, Muh. 2022. Pola Rekrutmen Politik Pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Political Science IPDN*.

Isnainy, Firdausi Nuzulla dan Oktariyanda, Trenda Aktiva. 2022. Manajemen Strategi Pemenangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Dalam Pemilihan Umum Kota Surabaya Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Publika*. Vol. 10 No. 2.

Kage, Rieko., Rosenbluth, Frances M., dan Tanaka, Seiki. 2019. What Explains Low Female Political Representation? Evidence from Survey Experiments in Japan. *Journal Politics and Gender*. Vol. 15.

Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur. Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur:Kajian Tentang Seleksi Perempuan di Partai Politik. *Riset Kepemiluan Tahun 2019*.

Kristina, Amareta. 2022. Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*. Vol. 9 No. 1.

Lupien, Pascal. 2022.Participatory Democracy, Democratic Education, and Women. *Journal Of Latin American Studies*. Published online by Cambridge University Press.

Martini, Ani Ani. 2021. Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*. Vol. 4 No. 1.

Muchtar, Khoiruddin dan Aliyudin. 2019. Public Relations Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilukada Jawa Barat. *Communicatos: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 3 No. 1.

Musarrofah, Ita. 2019. Pemikiran Pierre Bourdieu Tentang Dominasi Maskulin dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumbangannya Bagi Agenda Pengarusutamaan Gender di Indonesia. *Kafa'ah Journal*. Vol. 9 No. 1.

Nabila, Andi Aulia., dkk. 2019.Reformasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Melalui Gayatri Curriculum Program Guna Meningkatkan Daya Saing Perempuan dalam Ranah Politik. *Jurnal Legislatif*. Vol. 2 No. 2.

Nurussa'adah, Erfina dan Sumartias, Suwandi. 2017. Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Keterbukaan Ideologi. *Jurnal Kajian Komunikasi*. Vol. 5 No. 1.

Priandi, Rizki dan Rosiah, Kholis. 2019. Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1 No. 1.

Purwanti, Ani. 2015. Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 4 No. 2.

Puspito, Kuncoro. 2021. Strategi Pemenangan Caleg Dalam Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus: Kemenangan Danie Budi Tjahyono di Dapil Provinsi I Jawa Tengah). *Journal of Politic and Government Stud*ies. Vol. 10 No. 3.

Radojevic, Marco. 2022. The Subjective Effects of Gender Quotas: Party Elites Do Not Consider "Quota Women" to Be Less Competent. *Journal Politics and Gender*. Published online by Cambridge University Press. Ramadhanti, Rika. 2018. Partai Politik dan Demokrasi. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*. Vol. 16 No. 3.

Rofhani Rofhani dan Ahmad Nur Fuad. 2021. Moderating AntiFeminism: Islamism and Women Candidates in the Prosperous Justice Party (PKS). *Journal of Current Southeast Asian Affairs*. Vol 40 No. 1.

Sari, Lambertha Gundalibra dan Rozikin, Mohammad. 2022. Analisis Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Politik Berwawasan Gender: Studi Dokumentasi Tentang Gender di Indonesia. *Jurnal Syntax Idea*. Vol. 4 No. 5.

Yan Sudandi Sasue., dkk. 2022. Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Jabatan Politik Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jurnal Governance. Vol. 2 No. 2.

Sholeh, Febrian Taufiq. 2015.Manhaj Tarbiyah dalam Pendidikan Politik Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). *Jurnal Salam*. Vol. 8 No. 1.

Sumarzan. 2021. Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Analisis Peningkatan Jumlah Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019 Dapil 3 Aceh Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 6 No. 2.

Sutjipto, Vera Wijayanti., dkk. 2021. Citra Partai Keadilan Sejahtera Mengenai Perubahan Lambang Partai bagi Generasi Muda. *Jurnal Komunikasi*. Vol. 15 No. 2.

Suwarko, Andi. 2014. Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Rekruitmen Pengurus dan Caleg di DPW PAN Jawa Timur Pada Pemilu 2014. *Jurnal Review Politik*. Vol. 4 No. 2.

Walby, Sylvia. 2005. Gender Mainstreaming: Productive Tensions In Theory and Practice. *Social Politics: International Studies in Gender, State, and Society*. Vol. 12 No. 3.

Wiasti, Ni Made. 2017. Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Sunari Penjor: Journal Of Anthropology*.

Zaetun, Siti dan Mariyah, Chusnul. 2020. Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019. *The Journalish: Social and Government*. Vol. 1 No. 3.

Skripsi

Handika, Wawan. 2022. Skripsi: *Pola Rekrutmen Politik Pada Partai Politik (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Lombok Barat)*. (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram).

Hartoni, Moch Ridho. 2021. Skripsi: *Pola Kaderisasi Partai Politik di Provinsi Lampung (Studi Pada Partai Perindo dan Partai Berkarya)*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung).

Prasetio, Ade. 2018. Skripsi: *Model Oposisi Partai Politik Di Indonesia: Studi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Respons Gerindra dan PKS terhadap Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Tahun 2014-2017. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Putri, Nyanyak Marawan. 2020. Skripsi: *Branding Politik Calon Presiden Terhadap Meningkatnya suara PKS di DPRK Kota Banda Aceh Pada Pemilu 2019*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

Renhoat, Muhammad Lusi. 2020. Skripsi: *Peran Perempuan Dalam Partai Politik (Suatu Kajian Komunikasi Politik Pada Partai Demokrat Di Kota Tual)*. (Ambon: IAIN Ambon).

Susilawati, Desy. 2021. Skripsi: *Pelaksanaan Pendidikan Politik Partai Golkar dan NasDem di Kabupaten Sidrap (Analisis Siyasah Dusturiyah)*. (ParePare: IAIN ParePare).

Wibawa, I Made Asthi Hendrawan Satria. 2022. Skripsi: *Pola Rekrutmen Kader Partai Politik (Studi Pada Partai Golongan Karya Kabupaten Bangli Provisi Bali*. (Bali: IPDN).

Website

Badan Pusat Statistik, *"Metodologi Gender"*, dilansir dari https://bit.ly/3qlFava

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *"Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*. dilansir dari https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. "DP3K Jatim Gelar Pertemuan Penguatan Indeks Pembangunan Gender". dilansir dari https://bit.ly/3LB2otL

DPRD Provinsi Jawa Timur. "Keterwakilan Perempuan di DPRD Jatim Periode 2019-2024 Hanya 18,4 Persen". Diakses dari https://bit.ly/3M4zdhA

Hakim, Lukman. *"PKS targetkan raih 14 kursi DPRD Jatim pada Pileg 2024"*. Diakses dari https://bit.ly/3jGb5Wk

Kemenppa. *"Kertas Kebijakan 1: Pengarusutamaan Gender"*. Diakses dari https://bit.ly/3Iv5OhW

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *"Kesetaraan Gender: Perlu Strategi Antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat"*. diakses dari https://bit.ly/3HF9Q66

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *"Perempuan Dukung Perempuan Dalam Politik, Faktor Penting Namun Sering Terlupakan"*. dilansir dari https://bit.ly/3HL7faN

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *"Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Kementerian/Lembaga"*. dilansir dari, https://bit.ly/3q9KVBD

PKS. 2021. *"Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga"*. Cetakan Pertama. Diakses dari https://pks.id/file/ad-art-pks

PKS. *"Aspirasi"*. Diakses dari https://bit.ly/3ro4DHG

PKS, *"Daftarkan 120 Caleg DPRD, Ketua PKS Jatim: Optimis Raih Target 15 Persen Kursi"*. Dilansir dari https://bit.ly/3OdLsfJ

PKS. *"Evalina Heryanti, Perempuan Kristiani Pakar Olimpiade Gabung Dewan Pakar PKS"*. Dilansir dari https://bit.ly/43qG3XK

PKS. *"Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera"*. Diakses dari https://bit.ly/3gTdCym

PKS. *"Oposisi Politik"*. Diakses dari https://bit.ly/37QHZk9

PKS, *"Sejarah PKS"*. Diakses https://jatim.pks.id/sejarah-pks/

PKS. *"Susunan Pengurus"*. Diakses dari https://bit.ly/3JQiZqU

PKS. *"Visi dan Misi"*. Diakses dari https://bit.ly/3rqZ9vW

Portal dan Publikasi Pemilu dan Pemilihan KPU Provinsi Jawa Timur, Diakses dari https://bit.ly/3PWU8YO.

Sakti, Sofyan Arif Candra. *"Lilik Hendarwati Gantikan Arif HS Sebagai Anggota DPRD Jatim, Berkas Sudah Sampai Gubernur Khofifah"*. Diakses dari https://bit.ly/3jD8oof

UNDP. "Human Development Reports", Diakses dari http://bit.ly/3DxoBpn

UN Women, *"Women's leadership and political participation"*, diakses dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://bit.ly/3HWQDNf

Yahya, Achmad Nasrudin. *"Syaikhu: Sikap Oposisi PKS adalah Ijtihad Politik"*. Diakses dari https://bit.ly/3uRTql3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id